

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA  
PEMEKARAN DESA SOREANG PALIPI  
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
Untuk mencapai derajat Sarjana S-1**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan**



**Oleh:  
WAHIDIYAH SYAM  
E 121 09 259**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**Skripsi**

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA  
PEMEKARAN DESA SOREANG PALIPI  
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Wahidiyah Syam**

**E 121 09 259**

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi  
Pada Hari Selasa, Tanggal 27 Agustus 2013  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si  
NIP. 19641231 198903 1 027

Drs. H. Suhardiman Samsu, M.Si  
NIP. 19680411 200012 1 001

Mengetahui

**Ketua Jurusan Ilmu Politik/ Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Politik  
Universitas Hasanuddin**

Dr. H. A. Gau Kadir, M.A

NIP. 19501017 198003 1 002

**LEMBARAN PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA  
PEMEKARAN DESA SOREANG PALIPI  
KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

**Wahidiyah Syam**

**E 121 09 259**

telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi  
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, Pada Hari Jum'at, Tanggal 21 Maret 2014**

Menyetujui :

**PANITIA UJIAN**

Ketua	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	(	)
Sekretaris	: Drs. Abdul Salam Muchtar	(	)
Anggota	: Dr. H. A. Gau Kadir, M.A.	(	)
Anggota	: Dra. Hj. Nurlinah, M.Si.	(	)
Anggota	: Drs. A. M. Rusli, M.Si	(	)
Pembimbing I	: Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.	(	)
Pembimbing II	: Drs. H. Suhardiman Samsu, M.Si	(	)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”** ini, dapat penulis selesaikan.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ibunda **Hasna** dan ayahanda **Syamsuddin** atas segala pengorbanannya dalam melihat ananda menjadi pribadi yang lebih baik. Atas segala air mata, kasih sayang dan setiap lafalan doa yang selalu menyebutkan harapan-harapan bijak bagi kami semua putra-putrimu yang takkan pernah terbalas oleh ananda seutuhnya. Maaf atas segala lisan dan laku yang menyakitkan

yang pernah ananda lakukan secara sengaja maupun tidak. Keselamatan dunia akhirat untuk kalian wahai tetesan surga yang jatuh untuk kami anak-anakmu.

2. Saudara(i) keras kepala ***Fatmawati Syam, S.Pd, Hasbi Syam, S.Sos.I dan Nahrawi Syam, S.Pd***, atas segala bentuk dukungan moril dan materil selama penulis menempuh studi ini. Terima kasih banyak semoga suatu saat penulis bisa membalasnya aamiin.
3. Satu-satunya ponakanku, yang aktif dan cetar membahana, ***Azka Izzatul Islam AiswaSyam***, kehadiranmu membuat selalu kangen rumah, tumbuhlah menjadi anak berbakti kepada kedua orang tua, menjadi pribadi yang baik dan generasi cerdas serta taat agama. Aamiin.
4. Keluarga Kecilku di Mapala Kakak Lia dan Suami serta kedua adikku yang cantik Sarah dan Nania. Terima kasih atas bantuannya selama di Makassar.
5. Bapak ***Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS***, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
6. Bapak ***Prof. Dr. Hamka Naping, MA***. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.

7. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si., Prof. Dr. Supriadi Hamdat, M.Si.,** dan **Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si.,** selaku Wakil Dekan Fisip Unhas beserta seluruh stafnya.
8. Bapak **Dr. H. Gau Kadir, M.A.** selaku **Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisip Unhas** beserta seluruh stafnya.
9. Bapak **Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si.** selaku pembimbing I dan **Drs. H. Suhardiman Samsu, M.Si** selaku pembimbing II dan juga pembimbing akademik bagi penulis yang telah mencurahkan waktunya, tenaga dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh staf pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup FISIP UNHAS Universitas Hasanuddin.
11. Para Staf yang telah terepotkan selama penulis menginjakkan kaki di Fakultas tercinta kita terutama saat pengurusan berkas, **Ibu Hasna, Kak Irma** dan **Bu Nanna** (jurusan), **Ibu Liny, Pak Mursalim** dan Semuanya (akademik), **Kak Ija** dan **Bu Aisyah** (Kemahasiswaan) serta **Ibu Darma** dan **Kak Ima**, terima kasih dorongannya.
12. Pemerintah serta masyarakat Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atas penerimaan yang baik dan membantu penulis mendapatkan informasi yang diperlukan, maaf merepotkan.

13. Segenap Sahabat yang lebih dari Sahabat, **Aufklarung '09**, Jo, Nder, Ana, Ndhaa, Hel, Satria, Ardy, Imra, Chan, Ina, Mas Banjir, Dipo, Adhe, Jaya, Papangk, Ardy Sule, Ary, Cuna, Cayyo, Ipangk, Adam, Aidil, Erbon, Anto, Ewink, Ilyas, Ivha (dimana rimbamu sodari?), Rifad, dan Ketua Angkatan Dayat atas segala bantuan selama ini. Atas segala kebodohan dan keluguan di balik ketuan kita semua. Akan merindukan kebersamaan itu kawan. Buat Jo terima kasih atas semuanya, atas kebersamaan dan kenangan serta bantuan selama 4 (empat) tahun ini.
14. Kanda-kanda dan dinda-dinda dalam Himpunan Mahasiswa Pemerintahan ( HIMAPEM ) Fisip Unhas. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita
15. Teman-teman KKN Gelombang 82 Unhas Kabupaten Wajo Kecamatan Penrang terkhusus Desa Padaelo, Ada Pak Kordes (K'Ariel), Bundo (Athy), Kak Iccank, Iqbal, Hasman dan Kak Firda tak lupa Kak Buse' juga.
16. Teman-teman kost di Pondok Ijo Lumut dan Pondok Sriyanti yang telah memberi banyak pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu yang ada, memberi kebersamaan dan kekeluargaan yang membantu penulis hingga selesai.

17. Para Bintang Lover's, setelah ini penulis akan pensiun silahkan kalian mencari yang baru. Kegilaan dan pembelajaran selama kebersamaan takkan terlupakan.

18. Buat Orang lain yang sudah menjadi Saudara sesungguhnya, "**Kk Is**" terima kasih atas semuanya, kesediaanya meluangkan waktu selama 5 (lima) tahun terakhir buat penulis, sampai-sampai pacar Kk Is marah-marah (maaf yah ☺). Kesabaranmu, kesediaanmu serta ketulusanmu mendengar cerita-cerita penulis yang tidak penting, keluhan-keluhan sepele dan keteledoran melakukan tindakan, penulis haturkan banyak terima kasih, andai di ukur error timbangannya.

**"Tetaplah menjadi Kk buat Dhia ☺"**

19. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis.

Ucapan istimewa penulis sampaikan buat **IM** sekeluarga yang telah banyak memberi masukan dan bantuan selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Mendorong bahkan memaksa penulis untuk memperhatikan kuliah. Atas masalah yang ada, penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya, itu membuat penulis terdorong untuk membuktikan bahwa aku bisa dan aku tidak seperti itu. Penulis juga mohon maaf atas semuanya, semoga Allah mempertemukan kita kelak aamiin.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

***Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Makassar, Agustus 2013

***Wahidiyah Syam***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBARAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
INTISARI .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Kerangka Konseptual .....	7
1.4.1. Pelayanan.....	7
1.4.2. Pembangunan.....	8
1.4.3. Kesejahteraan Masyarakat.....	8

1.5. Defenisi Konsep.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Lokasi Penelitian .....	12
1.6.2. Tipe dan dasar Penelitian.....	13
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
1.6.4. Informan .....	15
1.6.5. Teknik Analisis Data.....	16
1.6.6. Validasi data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penyelenggaraan Pemerintaha Desa.....	18
2.2. Pemekaran Wilayah .....	29
2.3. Pelayanan .....	31
2.4. Pembangunan .....	34
2.5. Kesejahteraan Masyarakat.....	36
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Majene.....	39
3.2. Gambaran Umum desa Soreang Palipi.....	43
3.2.1. Sejarah .....	43
3.2.2. Visi dan Misis Desa Soreang Palipi .....	45
3.2.3. Kondisi Geografis Desa Soreang Palipi.....	46
3.2.4. Keadaan Penduduk .....	47
3.2.5. Pendidikan.....	48

3.2.6. Perekonomian.....	49
3.2.7. Kesehatan.....	51
3.2.8. Agama.....	51
3.2.9. Potensi Desa.....	52
3.3. Kondisi Pemerintahan Desa Soreang Palipi .....	53
3.2.1    Pembagian Wilayah Desa Soreang Palipi .....	53
3.2.2    Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Soreang Palipi.....	54

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Pelayanan. ....	60
4.1.1.    Tangibles (Bukti Nyata).....	63
4.1.2.    Reliability (Kehandalan).....	65
4.1.3.    Responsiviness (Daya Tanggap).....	66
4.1.4.    Assurance (Jaminan).....	67
4.1.5.    Empaty (Empati).....	68
4.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Pembangunan .....	69
4.2.1    Prasaran Desa .....	71
4.2.2    Kebutuhan Dasar .....	73
4.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	75

4.3.1 Tingkat Pendapatan.....	76
4.3.2 Tingkat Pendidikan .....	78
4.3.3 Tingkat Kesehatan.....	81
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	85
5.2. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data Geografi Desa Soreang Palipi 2012 . . . . .	47
Tabel 3.2	Data Penduduk Desa Soreang Palipi 2012. . . . .	48
Tabel 3.3	Sarana Pendidikan Formal/Nonformal . . . . .	49
Tabel 3.4	Mata Pencaharian.....	50
Tabel 3.5	Hasil Usaha Produktif . . . . .	50
Tabel 3.6	Sarana Kesehatan . . . . .	51
Tabel 3.7	Sarana Ibadah . . . . .	51
Tabel 3.8	Pola Penggunaan Tanah.....	52
Tabel 3.9	Jenis Populasi Ternak.....	53
Tabel 3.10	Pembagian Wilayah Desa Soreang Palipi.....	53
Tabel 4.1	Data Masalah dan Peringkat Masalah Desa Soreang Palipi.....	72
Table 4.2	Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Soreang Pallipi.....	77
Table 4.3	Hasil Usaha Produktif Desa Soreang Palipi.....	78
Tabel 4.4	Jumlah Lembaga Pendidikan Formal.....	79
Tabel 4.5	Jumlah Lembaga Pendidikan Nonformal.....	79
Tabel 4.6	Potensi SDM Desa Soreang Palipi Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	81

Tabel 4.7	Sarana Kesehatan Desa Soreang Palipi Tahun 2012...	82
Tabel 4.8	10 Penyakit Terbanyak di Derita Masyarakat Desa Soreang Palipi.....	82
Table 4.9	Perspektif Pemerintah dan Masyarakat tentang Pemecahan Masalah Desa.....	83

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual .....	10
Gambar 3.1 Peta Topografi Kabupaten Majene .....	40
Gambar 3.2 Peta Topografi Kecamatan Banggae .....	42
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Soreang Palipi .....	55

## INTISARI

**WAHIDIYAH SYAM, Nomor Pokok E 121 09 259, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik–Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dengan judul skripsi “Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene”, dibawah bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M. Si., dan Drs. H. Suhardiman Samsu, M.Si.**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, menggambarkan dan menganalisis Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sedangkan dasar penelitian ini adalah survey. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi kepustakaan, dan studi lapang dalam bentuk observasi dan wawancara serta penelusuran data online. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran desa dari aspek pelayanan dinilai telah maksimal dalam artian memuaskan masyarakat. Namun penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran dari aspek pembangunan masih begitu minim. Sebagai desa hasil pemekaran yang tata pemerintahannya baru berjalan selama kurang lebih dua tahun, maka gerak laju pembangunannya masih lambat. Pemerintah telah mengupayakan pembangunan-pembangunan baik fisik dan nonfisik. Penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran dari aspek kesejahteraan belum dirasakan. Walaupun tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta lebih khusus pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tapi Desa Soreang Palipi belum bisa merasakan perubahan yang berarti. Faktor ini bukan karena penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai melainkan usia dari desa ini yang masih begitu muda.

## ABSTRACT

**WAHIDIYAH SYAM** , registration number **E 121 09 259** , **Government Science Program , Department of Political Science - Government , Faculty of Social and Political Sciences** , thesis titled "**Analysis of the Governing Post- Expansion of the District Rural Soreang Palipi Banggae Majene** " , under the guidance of Dr . H. A. Samsu Alam , M. Si . , And Drs . H. Suhardiman Samsu , M.Sc.

The purpose of this study was to determine , describe and analyze the Governing Post- Redistricting Rural District of Banggae Soreang Palipi Majene .

This type of research is descriptive , study which aims to provide an overview or explanation of the Governing Post-Expansion of the District Rural Soreang Palipi Banggae Majene , while basic research is a survey . Data collection was performed using library research techniques , and field study in the form of observations and interviews as well as online data retrieval . The data obtained and analyzed qualitatively .

The results of this study indicate that the administration of post-expansion of the village has a maximum rated service aspect in terms of satisfying the public . But after the division of the governance aspects of the development is still very minimal . As a result the village its governance division which has been running for approximately two years , the pace of development remains slow motion . The Government has sought the developments of both physical and non-physical . Governance after the expansion of the welfare aspects yet to be felt . Although the goal of regional autonomy and fiscal decentralization as well as other more specialized division is not a sustainable way to improve the welfare of society but Soreang Village Palipi can not feel any significant change . This factor is not because of governance that do not fit , but the age of this village are still so young .

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang - undang.

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat* maka Indonesia tidak akan mempunyai Daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah - daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang - Undang“. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerahpun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui UU No 22/1999 yang saat ini telah direvisi melalui UU No

32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dilandasi oleh semangat untuk membangun kemandirian dan kreativitas daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan serta memberdayakan masyarakat daerah sehingga terjadi pergeseran pembagian kewenangan dan urusan daerah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Bagi pemerintah daerah sebagai organisasi yang mengemban fungsi utama pemerintahan yaitu, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik, penilaian kerja memiliki arti yang sangat penting terutama dalam melakukan perbaikan-perbaikan di tahun berikutnya. Penilaian kerja bagi pemerintahan daerah berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, efisiensi pelayanan, motivasi para birokrat pelaksanaan, dan lain - lain.

Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang ini berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (daya beli). Dengan latar belakang keadaan demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Sesuai dengan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah maka kualitas sumber daya manusia dan

pengadaan sarana kebutuhan masyarakat perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapinya dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.

Indikasi keberhasilan pemekaran wilayah adalah terjadinya peningkatan pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya proses demokratisasi telah mendorong masyarakat untuk lebih berani mengemukakan aspirasinya. Salah satu bentuk aspirasi masyarakat adalah keinginan membentuk pemerintahan sendiri baik pada level kabupaten/kota maupun level propinsi bahkan desa.

Pemekaran wilayah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapan selama ini, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom.

Mengacu pada pembahasan di atas maka mendorong Desa Soreang Palipi membentuk desa sendiri, diharapkan Desa Soreang Palipi dapat tumbuh dan berkembang baik, termasuk aktivitas perekonomian, sosial, budaya sesuai dengan harapan masyarakat pada saat dilakukan pemekaran, seperti mempercepat pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan serta perekonomian dan kesejahteraan meningkat dan dapat mempermudah pengurusan surat-surat atau urusan pemerintahan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hal tersebut dengan judul **”ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PASCA PEMEKARAN DESA SOREANG PALIPI KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana dampak pemekaran terhadap kualitas pelayanan masyarakat Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ?
2. Bagaimana dampak pemekaran terhadap peningkatan pembangunan Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ?
3. Bagaimana dampak pemekaran terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene?

## **1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan dari aspek pelayanan pasca pemerkan di Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene
2. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan dari aspek pembangunan pasca pemerkan Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan dari aspek kesejahteraan masyarakat pasca pemerkan di Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Ilmu Pengetahuan
  1. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
  2. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah pemekaran wilayah
- b. Bagi Instansi terkait dan masyarakat

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah setempat mengenai penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran desa

## 1.4 Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Pelayanan

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara masyarakat.

Dimensi kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons dalam Sinambela (2007:7), menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yaitu :

1. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberi janji terhadap pelayanan yang meliputi dua hal yaitu dapat dipercaya dan akurat ( tepat dan teliti).
2. *Tangibles* (bukti langsung), yaitu penampilan fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, penampilan pegawai, dan sarana komunikasi yang disediakan.
3. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu keinginan untuk membantu para pengguna dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat.
4. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan, etika, dan moral para karyawan dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada pengguna.

5. *Empathy* (empati), yaitu tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

#### **1.4.2 Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu perubahan-perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik atau dari yang tidak ada menjadi ada. Perubahan-perubahan tersebut dilaksanakan secara berencana dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia yang juga banyak tersebar di seluruh penjuru tanah air. Pendaya-gunaan sumber daya tersebut perlu terus menerus diupayakan.

Dalam teori pembangunan desa dari Rondinelli yang merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertaniannya, mangangkut hasil pertanian agar lebih mudah dll.

#### **1.4.3 Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard dan norma-

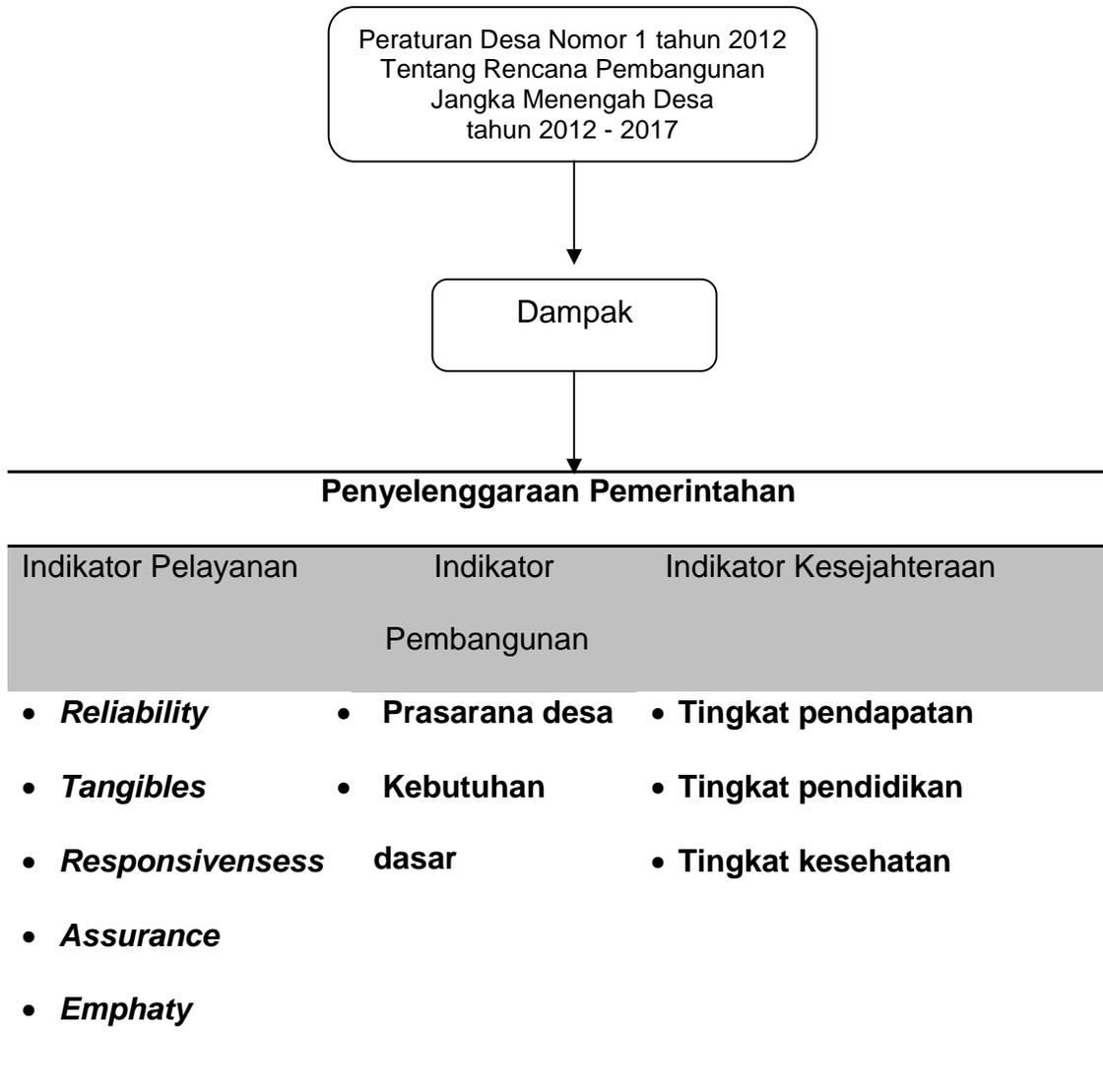
norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- a. Tingkat pendapatan keluarga;
- b. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- c. Tingkat pendidikan keluarga;
- d. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- e. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

**Gambar 1.1**

**BAGAN KERANGKA KONSEPTUAL**



**1.5 Defenisi Konsep**

Untuk lebih mengarahkan dalam melakukan penelitian ini maka disusun defenisi opsional sebagai berikut :

1. Kualitas pelayanan masyarakat Desa soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Adapun indikator yang digunakan peneliti adalah :
  - a. *Reliability* ( keandalan ), peneliti ingin mengetahui bagaimana kemampuan untuk memberi janji terhadap pelayanan yang meliputi dua hal yaitu dapat dipercaya dan akurat (tepat dan teliti)
  - b. *Tangibles* (bukti langsung), peneliti ingin mengetahui penampilan fasilitas - fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, penampilan pegawai, dan sarana komunikasi yang disediakan.
  - c. *Responsiveness* (daya tanggap), peneliti ingin mengetahui bagaimana keinginan pemerintah untuk membantu para masyarakat dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
  - d. *Assurance* (jaminan), peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kesopanan para pegawai dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat.
  - e. *Empathy* (empati), peneliti ingin mengetahui sejauh mana perhatian atensi perorangan dan kantor kepada masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan Desa soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Adapun indikator yang digunakan peneliti adalah :

- a. Prasarana desa, peneliti ingin mengetahui sejauh mana perkembangan prasarana desa yang ada pasca pemekaran terjadi.
  - b. Kebutuhan dasar, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pasca pemekaran.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Adapun indicator yang digunakan peneliti adalah :
- a. Tingkat pendapatan, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pendapatan masyarakat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan.
  - b. Tingkat pendidikan, peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat pendidikan masyarakat desa Soreang Palipi
  - c. Tingkat kesehatan peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat kesehatan masyarakat desa Soreang Palipi

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

### **1.6.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene sebagai Desa hasil pemekaran.

### **1.6.2 Tipe dan Dasar Penelitian**

1. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (keterangan) yang lebih akurat dan mendalam berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.
2. Dasar penelitian yang dilakukan adalah survey yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis suatu peristiwa atau proses tertentu dengan memilih data atau menentukan ruang lingkup tertentu sebagai sampel yang dianggap representatif.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Teknik wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau interview yang dilakukan secara bebas namun terarah, dengan kata lain pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan sudah dipersiapkan sebelumnya, dan jika diperlukan pertanyaan tersebut dapat berkembang melihat situasi dan kondisi di lapangan. Melalui teknik ini, penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran.

## **2. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan jalan mengamati dan mencatat secara langsung di lokasi penelitian atas gejala-gejala yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan petunjuk yang dibutuhkan.

## **3. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan atau library research yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain ( on-line ) yang ada hubungannya dengan pemekaran wilayah desa.

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan sekunder :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
  - a. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - b. Interview atau wawancara mendalam ( in dept interview ) yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang

berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

2. Data sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi.

Adapun data sekunder diperoleh melalui :

- a. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait dengan topic penelitian. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.
- b. Dokumentasi, yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris terkait dengan penelitian yang dilakukan.

#### **1.6.4 Informan**

Informan adalah orang yang berada pada lingkungan penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Adapun Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa Soreang Palipi
2. Ketua panitia pembentukan desa
3. Perangkat Desa
4. Tokoh Masyarakat

### **1.6.5 Teknik Analisis data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggambarkan menjelaskan hasil-hasil penelitian dari sejumlah data-data yang telah diperoleh dilapangan selama penelitian berlangsung. Data dalam penelitian ini diperoleh observasi, wawancara, dan studi literatur serta dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam hingga didapatkan data yang cukup.

### **1.6.6 Validasi Data**

Untuk memperoleh kebenaran, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut *Denzim*, *triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Idrus, 2009:145)*. Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-*cross check* informasi antara informan yang satu dengan invorman yang lain.

Adapun beberapa macam teknik triangulasi, maka pada penelitian ini yang akan digunakan adalah teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbedadalam

metode kualitatif. Triangulasi sumber ini dapat dilakukan dengan beberapa jalan, yaitu :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara,
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi,
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu,
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan, dan
- e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dari kelima jalan dalam proses triangulasi sumber tersebut, maka pada penelitian akan digunakan jalan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga. Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa.

Menurut **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut **Juliantara,( 2005: 18)** Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang - Undang Dasara 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas Wilayah.
- c. Bagian Wilayah Kerja.
- d. Perangkat, dan.
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupten/Kota kepada Desa, pada prinsipnya mengatur jenis dan rincian urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang serahkan kepada desa, tata cara penyerahan urusan, pelaksanaan urusan, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan. Jenis urusan pemerintahan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa adalah sebagai berikut:

1. Bidang pertanian dan ketahanan pangan;
2. Bidang pertambangan dan energi serta sumberdaya mineral
3. Bidang kehutanan dan perkebunan;
4. Bidang perindustrian dan perdagangan
5. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
6. Bidang penanaman modal;
7. Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
8. Bidang kesehatan

9. Bidang pendidikan dan kebudayaan
10. Bidang sosial
11. Bidang penataan ruang
12. Bidang pemukiman/perumahan;
13. Bidang pekerjaan umum;
14. Bidang perhubungan;
15. bidang lingkungan hidup
16. Bidang politik dalam negeri dan administrasi publik;
17. Bidang otonomi desa;
18. bidang perimbangan keuangan;
19. Bidang tugas pembantuan;
20. Bidang pariwisata;
21. Bidang pertanahan;
22. Bidang kependudukan dan catatan sipil;
23. Bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintah umum
24. Bidang perencanaan
25. Bidang penerangan/informasi dan komunikasi;
26. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
27. Bidang keluarga berencana dan keluarga sehat;
28. Bidang pemuda dan olah raga;
29. Bidang pemberdayaan masyarakat desa;

30. bidang statistik;

31. Bidang arsip dan perpustakaan;

Penyerahan jenis urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Penetapan jenis urusan pemerintahan kabupaten/kota pada masing-masing desa, dengan memperhatikan keputusan kepala desa dan menyerahkan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh kepala Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota. Urusan yang telah diserahkan harus dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan kepada desa atas permintaan pemerintah desa. Bahkan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menarik urusan pemerintah yang telah diserahkan pada pemerintahan desa. Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/ Kota yang telah diserahkan kepada desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten/kota kepada desa, mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan dapat didelegasikan dan Bupati/Walikota kepada Camat.

Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Penyerahan urusan pemerintahan disertai dengan pembiayaannya. Pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekretaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan dan perangkat desa lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat.

**Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7)** Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam **PP No. 72 Tahun 2005 pasal 14 dan 15** disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan

masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.

- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN);
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD. Sedangkan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) PP No. 72 Tahun 2005 yaitu Sekretaris Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Sedangkan Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa. Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan usia perangkat desa tersebut paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Mengenai Perangkat Desa Lainnya ini diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang maupun

barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. Sumber pendapatan desa adalah:

- a. Pendapatan asli desa (hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah).
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dan dari retribusi Kabupaten/Kota.
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

## **2.2 Pemekaran Wilayah**

Pemekaran wilayah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah wilayah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan

ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah. Pemekaran daerah era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang problematika yang dihadapi secara alternative pemecahan masalah

Tri Ratnawati (2009:47) berpendapat bahwa pemekaran wilayah di Indonesia secara besar-besaran sehingga berubah menjadi semacam bisnis atau industri pemekaran saat ini, tidak sepenuhnya didasari oleh pandangan-pandangan normative teoritis seperti yang tertera dalam peraturan pemekaran wilayah atau dalam teori-teori desentralisasi yang dikemukakan oleh banyak pakar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengambangkan demokrasi local, memaksimalkan akses public pemerintahan, mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, menyediakan pelayanan publik sebaik dan seefisien mungkin, dan lain-lain. Pemekaran wilayah/daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru di era reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat di daerah.

Dengan demikian pemekaran wilayah merupakan pemisahan suatu wilayah dari wilayah induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada didalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara yang satu dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha pemekaran wilayah aka diciptakan ruang publik baru yang merupakan kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa diuntungkan karena palayanannya lebih maksimal.

Dalam pemekaran wilayah terdapat tujuan pembangunan otonomi daerah, yaitu :

- a. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah harus berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Pembangunan kestabilan politik dan dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa
- d. Dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan

Selain itu dalam pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkannya harus memiliki prinsip otonomi daerah yaitu

terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan tanggungjawab. Akhirnya pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.

### **2.3 Pelayanan**

Menurut Kolter dalam Lukman ( 2008:8), pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan ataupun kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Samparan berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan yang orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 2001:781-782) pelayanan sebagai hal, cara atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima, menggunakan.

Pelayanan publik diartikan, pemberian layanan keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok atau tata cara yang ditetapkan. Dengan

demikian, pelayanan public adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara masyarakat. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya Negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, mialnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi (Sujadi 2009:9) :

1. Kepastian hukum
2. Transparan
3. Daya tangkap
4. Berkeadilan
5. Efektif dan erisien
6. Tanggung jawab
7. Akuntabilitas

Pada hakikatnya pelayanan publik adalah pemberian pelaayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Karena itu

pengembangan pelayanan publik, yakni : unsur kelembagaan penyelenggara pelayan, proses pelayanannya serta sumber daya manusia pemberi layanan.

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari (Sujadi 2009:10) :

1. Transparasi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Partisipasif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan lain-lain.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Dimensi kualitas pelayanan menurut Fitzsimmons dalam Sinambela (2007:7), menyatakan bahwa terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yaitu :

6. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberi janji terhadap pelayanan yang meliputi dua hal yaitu dapat dipercaya dan akurat ( tepat dan teliti).

7. *Tangibles* (bukti langsung), yaitu penampilan fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, penampilan pegawai, dan sarana komunikasi yang disediakan.

8. *Responsiveness* (daya tanggap), yaitu keinginan untuk membantu para pengguna dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat.

9. *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan, kesopanan, etika, dan moral para karyawan dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada pengguna.

10. *Emphaty* (empati), yaitu tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa pengertian kualitas secara singkat yaitu bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dan diukur serta mampu memenuhi keinginan atau

kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, dan tepat guna (tepat sasaran) serta dapat memenuhi kebutuhan dari seseorang yang melakukan pelayanan. Kualitas pelayanan dikatakan baik apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan melebihi dari apa yang diharapkan oleh pelanggan (masyarakat).

## **2.4 Pembangunan**

Berbagai pengertian pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial. Berbagai pengertian ini pada intinya meliputi pembangunan bidang ekonomi, politik dan social budaya.

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya, pembangunan supaya menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya.

Yang dimaksud dengan pembangunan adalah suatu perubahan-perubahan dari keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik atau dari yang tidak ada menjadi ada. Perubahan-perubahan tersebut dilaksanakan secara berencana dengan memanfaatkan segala sumber daya manusia yang juga banyak tersebar di seluruh penjuru

tanah air. Pendaya-gunaan sumber daya tersebut perlu terus menerus diupayakan.

Arah pembangunan bangsa Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, secara garis besar dapat disebutkan beberapa tujuan pokoknegara kita, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Empat cita-cita pokok bangsa Indonesia tersebut cukup padat dan mempunyai makna yang sangat luas. Bangsa Indonesia tidak hanya bercita-cita meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga ikut menjaga ketertiban dunia dalam rangka kemaslahatan hidup manusia.

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga (Katz dalam Tjokrowinoto 1995). Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran

kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut (Todaro,1977). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation building*)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

## **2.5 Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam membahas kesejahteraan, tentu harus diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan. Sejahtera menurut **W.J.S Poerwadarmita** adalah ‘aman, sentosa, dan makmur’. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi kemanan, keselamatan dan kemakmuran.

Kesejahteraan atau yang biasa disebut kesejahteraan sosial merupakan serangkaian aktifitas yang terorganisir yang ditunjukkan

untuk meningkatkan kualitas hidup, relasi sosial, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras dengan standard dan norma-norma masyarakat sebagai tujuan merupakan cita-cita, pedoman dan aspirasi agar terpenuhinya kebutuhan materi, sosial dan spiritual.

**James Midgley (1997: 5)** kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi 3 syarat utama: ketika masalah sosial dapat dimenej dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan, jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, rekreasi, budaya, dan sebagainya. Salah satu landasan hukum yang

dijadikan acuan adalah undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Dalam penjelasan umum ditetapkan bahwa lapangan kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial (dalam arti sempit).

Biro Pusat Statistik Indonesia (2000) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah :

- f. Tingkat pendapatan keluarga;
- g. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan;
- h. Tingkat pendidikan keluarga;
- i. Tingkat kesehatan keluarga, dan;
- j. Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga

**Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989),** kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *materi*, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *fisik*, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;

- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *mental*, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi *spiritual*, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai warga masyarakat.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun hal-hal yang akan dikemukakan dalam bab ini terdiri dari sejarah Desa Soreang Palipi, keadaan geografis, keadaan demografi, dan batas- batas wilayah serta gambaran tentang Desa Soreang Palipi.

#### **3.1. Gambaran Umum Kabupaten Majene**

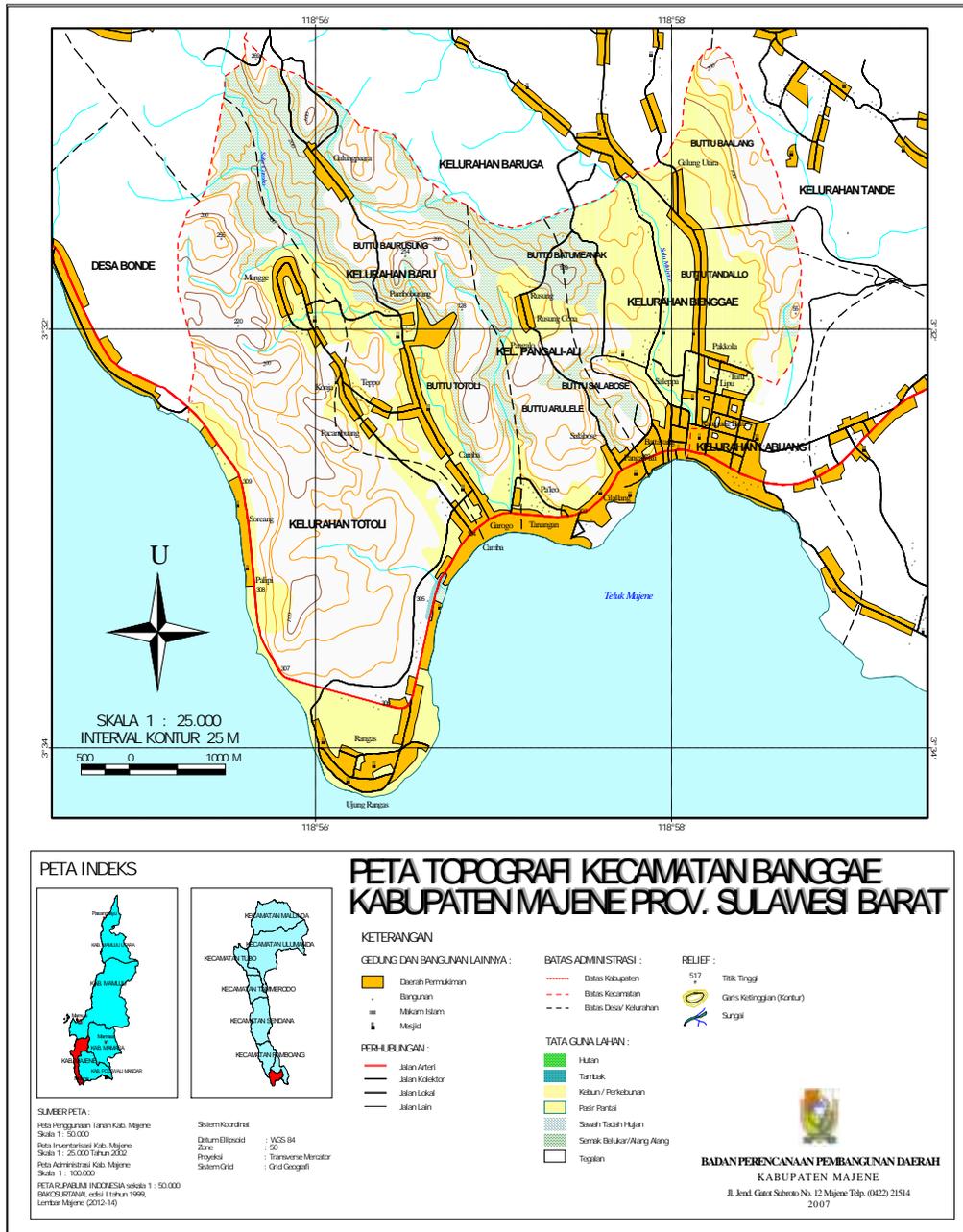
Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 kabupaten dalam wilayah provinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 km yang terletak di pesisir pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke utara dengan luas 947,84 km. kabupaten Majene terdiri dari 8 kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, malunda dan Ulumanda, yang meliputi 40 desa dan kelurahan. Ibukota kabupaten majene terletak di kecamatan banggae.

Secara geografis kabupaten majene terletak pada posisi 2' 38' 45" sampai dengan 3' 38' 15" Lintang Selatan dan 118' 45' 00" sampai 119' 4' 45" Bujur timur, dengan berbatasan di sebelah utara kabupaten Mamuju, sebelah timur kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk mandar, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relative miring dengan persentase

wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41 % dan luas wilayah kabupaten, dengan suhu udara antara 21 C sampai 34

**Gambar 3.1**

**Peta Topografi Kabupaten Majene**



Jumlah penduduk Kabupaten Majene adalah 137.474 jiwa yang terdiri dari jumlah pria 66.494 jiwa dan jumlah perempuan 70.980 jiwa dengan kepadatan 1.040 jiwa per km untuk kota Majene (Kec. Banggae). Tingkat pertumbuhan penduduk untuk kabupaten Majene adalah 0,21% pertahun dan 1,40% pertahun untuk kota Majene. Dengan mayoritas agama Islam

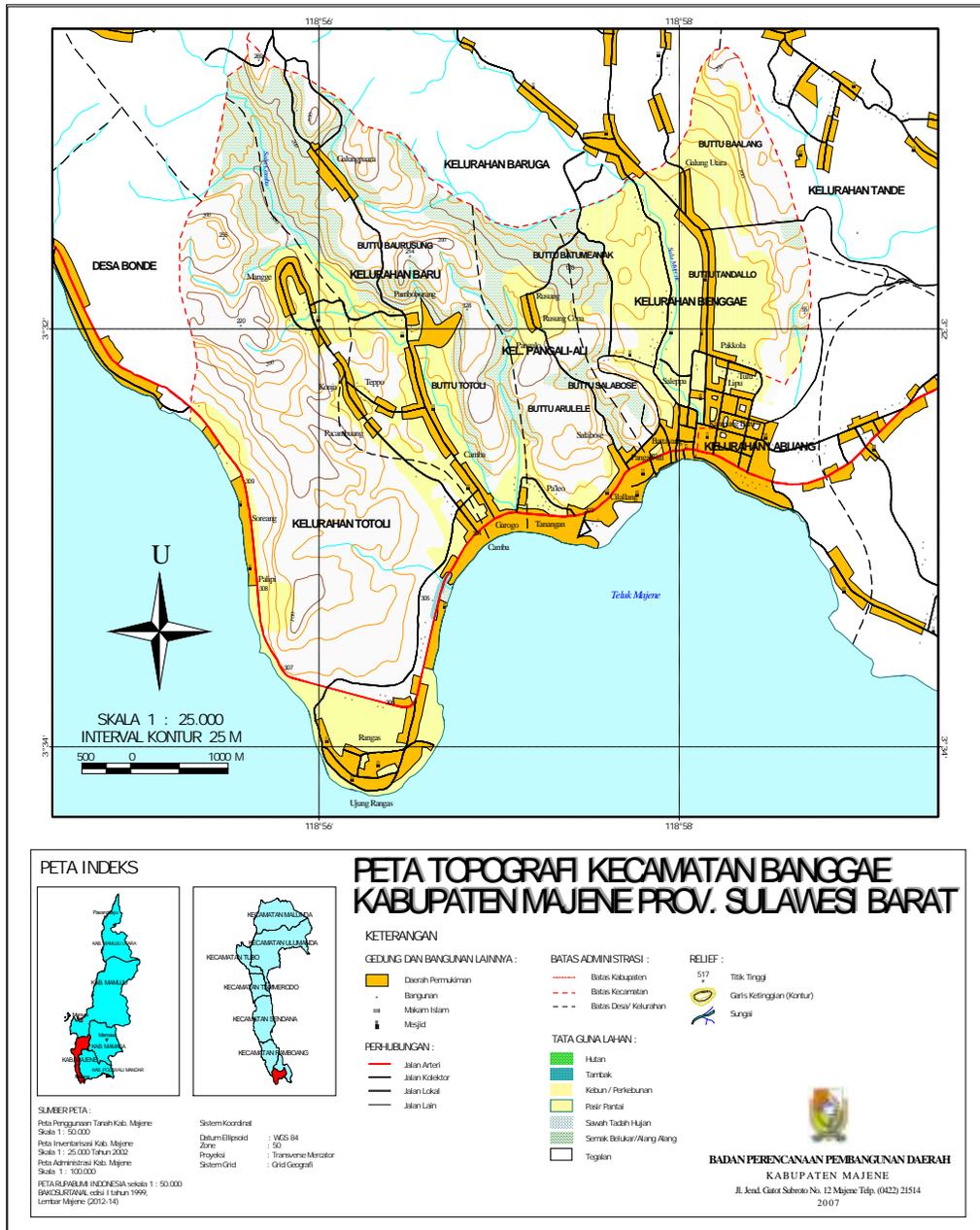
Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan jarak tempuh  $\pm$  142 km dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju). Kecamatan Banggae dengan luas 25,15 Km<sup>2</sup>. Posisi Kecamatan Banggae yang berada pada jalur jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), sehingga dari segi akses perhubungan tidak terlalu sulit dijangkau, namun pada tingkat Kelurahan/lingkungan sarana dan prasarana jalan masih sangat kurang. Wilayah Kecamatan Banggae berbatasan dengan sebelah utara Kelurahan Baruga, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bonde, dan sebelah timur Kecamatan Banggae Timur.

Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0-1.600 meter di atas permukaan laut. Daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi

yang mulai rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah ladang.

Gambar 3.2

Peta Topografi Kecamatan Banggae



Struktur Perekonomian Kab. Majene sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian sebesar 54, 12 % kemudian sektor perdagangan, restoran & hotel sebesar 13.07 %, dan sektor jasa-jasa sebesar 12,12%, serta disusul oleh sektor-sektor pendukung lainnya. Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap struktur perekonomian Kab. Majene memberi gambaran adanya peluang pengembangan bidang pertanian, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mempertahankan kelestarian alam, memperbesar kesempatan dan pemerataan kerja, memberikan peluang ekspor dan memenuhi kebutuhan industri serta meningkatkan pendapatan petani

## **3.2. Gambaran Umum Desa Soreang Palipi**

### **3.2.1. Sejarah Desa Soreang Palipi**

Sejarah Desa Palipi Soreang yang mana sebelum berdiri atau mekar menjadi satu desa merupakan satu kesatuan dari Kelurahan Totoli yang meliputi lingkungan Soreang, lingkungan Palipi, lingkungan rangas barat, rangas pa'besoang, rangas tammalassu, rangas timur, lingkungan passarang, lingkungan deteng-deteng, dan lingkungan Mangge yang dipimpin oleh Kepala kelurahan yakni bapak Drs. Asri, dan setelah ada permohonan pemekaran akhirnya kelurahan totoli mekar menjadi tiga wilayah berdasarkan peraturan daerah kabupaten majene no. 8 tahun 2010 tentang pembentukan kelurahan menjadi kelurahan dan pembentukan kelurahan menjadi desa di wilayah kabupaten majene yang terdapat pada pasal 3 poin 1 tentang

pemekaran kelurahan totoli di wilayah kecamatan banggae, dimekarkan dan dibentuk wilayah baru yaitu : Kelurahan Totoli, kelurahan Rangas dan Desa Soreang Palipi.

Atas dasar keputusan pemerintah kabupaten Majene tersebut diatas, maka resmiah terbentuknya desa Soreang palipi yang meliputi dusun Lambe, dusun kanappe, dusun labu-labuang, dusun alindung dan dusun batu-batu yang awal berdirinya dipimpin oleh pejabat kepala desa yakni Bapak Emil Nugraha, S.STP yang mempunyai tugas pokok membentuk badan permusyawaratan desa ( BPD ) serta berkoordinasi dengan BPD tersebut dalam hal pembentukan panitia pemilihan kepala desa (PPKD) dan panitia pengawas (PANWAS) dalam pelaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa soreang palipi pertama tahun 2011 untuk masa jabatan 2011/2017, yang menandakan terlaksananya proses demokrasi, dan sejarah bagi masyarakat desa soreang palipi.

Akhirnya melalui pemilihan kepala desa Soreang Palipi tahun 2012 yang secara langsung dipilih oleh masyarakat tanggal 31 oktober 2011, terpilihlah Bapak Wardin Wahid, SH sebagai kepala desa Soreang Palipi periode 2011/2017 yang ditandai dengan surat keputusan bupati Majene Nomor 215/HK/KEP-BUP/I2011 Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala desa Diwilayah Pemekaran Se Kabupaten Majene.

### **3.2.2. Visi dan Misi Desa Soreang Palipi**

Desa Soreang Palipi telah menetapkan Visi tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan rumusan yakni : “Mewujudkan pemerintahan desa yang baik, bersih, transparan dan amanah menuju Desa Soreang Palipi yang maju, kompak, dinamis, agamais dan bermartabat”

Berdasarkan visi Desa Soreang Palipi Tahun 2012 tersebut diatas, dirancang langkah-langkah yang terencana, sistematis dan berkesinambungan yang disebut misi. Misi Desa Soreang Palipi Tahun 2012 sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- b. Melaksanakan pembangunan desa berdasarkan demokrasi, kebersamaan, keadilan, serta kemandirian
- c. Memberikan pelayanan yang optimal serta memperkokoh persatuan dan kerukunan antar warga tanpa memandang status sosial, golongan maupun garis keturunan.
- d. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi penciptaan

lapangan kerja seluas-luasnya dengan berbasiskan pada potensi asli desa

- e. Melestarikan seni budaya yang ada dalam masyarakat
- f. Mendorong partisipasi dalam masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan social
- g. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat intuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak.

### **3.2.3. Kondisi Geografis Desa Soreang Palipi**

Secara geografis Desa Soreang Palipi berada dalam ruang lingkup Kecamatan Banggae. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonde Kecamatan Pamboang dan di sebelah timur berbatasan dengan Lingkungan Mangge Kelurahan Totoli. Sedangkan dibagian Barat berbatasan dengan laut lepas dan disebelah selatan berbatasan dengan Rangas barat Kelurahan Totoli.

**Tabel. 3.1**

**Data Geografi Desa Soreang Palipi Tahun 2012**

No	Uraian	Keterangan
1	Batas Wilayah <ul style="list-style-type: none"><li>• Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonde</li><li>• Sebelah timur berbatasan dengan Ling. Mangge Kel. Totoli</li><li>• Sebelah selatan berbatasan dengan rangas barat Kel. Totoli</li><li>• Sebelah barat berbatasan dengan laut</li></ul>	Kec. Pamboang Kec. Banggae Kec. Banggae
2	Jumlah Dusun RT/RW <ul style="list-style-type: none"><li>• Dusun</li><li>• RT</li><li>• RW</li></ul>	5 5
3	Tinggi Dari Permukaan Laut	0,25 km
4	Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Kecamatan	4 km
5	Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Kabupaten	7 km
6	Jarak Dari Ibu Kota Desa ke Provinsi	133 km

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

**3.2.4. Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa. Penduduk desa Soreang Palipi tahun 2012 tercatat sebanyak 344 Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1778 jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat desa Soreang Palipi tahun 2012 dapat dilihat pada table 3.2

**Tabel 3.2**

**Data Penduduk Desa Soreang Palipi 2012**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah Jiwa</b>	<b>Persentase</b>
1	Laki-laki	971	
2	Perempuan	923	
	Total	1894	

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

**3.2.5. Pendidikan**

Fasilitas pendidikan di desa Soreang Palipi cenderung masih begitu minim. Sarana pendidikan formal masim belum begitu lengkap tetapi sarana pendidikan non formal sudah relative lengkap. Hal ini dapat dilihat pada table 3.3, sarana pendidikan formal hanya terdapat 2 bangunan Sekolah dasar (SD), dan sarana pendidikan non formal 1 bangunan Taman Kanak-Kanak (TK), 2 bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 3 bangunan Taman Pendidikan Al-Qur'an, 3 bangunan TKA, 2 group Kelompok Rebana Perempuan serta 4 group Kelompok Rebana Laki-laki.

**Tabel 3.3**

**Sarana Pendidikan Formal / Non Formal**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1	SD	2 Buah
2	TK	1 Buah
3	PAUD	2 Buah
4	TPA	3 Buah
5	TKA	3 Buah
6	Kelompok Rebana Perempuan	2 Group
7	Kelompok Rebana Laki-laki	4 Group

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

**3.2.6. Perekonomian**

Secara umum keadaan ekonomi masyarakat desa Soreang Palipi masih rendah disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia. Pada umumnya masyarakat desa Soreang Palipi lebih dominan bekerja disektor perikanan, pertanian dan perkebunan. Mereka menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana sehingga pendapatan mereka masih sangat rendah. Bekerja dibidang tersebut belum dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya apalagi pada sektor-sektor lainnya.

**Table 3.4**

**Mata Pencaharian**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Nelayan	63	Orang
2	Petani	124	Orang
3	Peternak	186	Orang
4	PNS	36	Orang
5	Honorer	15	Orang
6	Wiraswasta	51	Orang
7	Tukang Kayu	40	Orang
8	Tukang Batu	44	Orang
9	Tukang Ojek	10	Orang
10	Supir Mobil	15	Orang
11	Tukang Becak	19	Orang

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Dapat dilihat pada table 3.5 hasil usaha produktif yang mendukung perekonomian masyarakat yang ada di desa Soreang palipi

**Tabel 3.5**

**Hasil Usaha Produktif**

<b>No</b>	<b>Sektor</b>	<b>Usaha</b>	<b>Ket</b>
1	Nelayan	Ikan	
2	Pertanian	Ubi kayu Pisang	
3	Perkebunan	Kelapa	
4	Produksi/Kerajinan	Produksi minyak kelapa Produksi pupuk organik Pembuatan sarung sutra	

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

### 3.2.7. Kesehatan

Sarana kesehatan yang terdapat di Soreang Palipi yaitu : 2 posyandu dan 1 pustu dengan kondisi sarana baik. Sarana ini dipergunakan oleh masyarakat sesuai fungsinya.

**Tabel 3.6**

#### **Sarana Kesehatan**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Alamat</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pustu	Dusun Alinduang	Baik dibangun tahun 2008
2	Posyandu	Dusun Alinduang	Baik dibangun tahun 2008
3	Posyandu	Dusun Lambe	Baik dibangun tahun 2010

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

### 3.2.8. Agama

Sarana atau tempat ibadah adalah suatu hal yang mutlak diperlukan dalam menunjang jalannya proses ibadah bagi para pemeluknya. Desa Soreang Palipi seluruh penduduknya menganut agama Islam.

**Table 3.7**

#### **Sarana Ibadah**

<b>No</b>	<b>Nama Mesjid</b>	<b>Alamat</b>
1	Baitul Mahmudah	Dusun Kanappe'
2	Muhabbah	Dusun akinduang
3	Mahmubah	Dusun batu-batu

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

### 3.2.9. Potensi Desa

Desa Soreang Palipi memiliki beberapa potensi, yakni dalam bidang pertanian meliputi perkebunan serta potensi dalam bidang peternakan.

**Tabel 3.8**

#### **Pola Penggunaan Tanah**

<b>No</b>	<b>Lahan</b>	<b>Volume</b>
1	Kuburan	1,0 Km
2	Perkebunan	2,6 Km
3	Pekarangan	0,3 Km
4	Perumahan dan pemukiman	1,4 Km
5	Perkantoran	0,4 Km
6	Bangunan lainnya	0,6 Km

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Potensi dalam bidang peternakan yang dimiliki oleh desa Soreang palipi pada dasarnya masih sangat rendah , hal ini ditunjukkan dari data yang di muat didalam RPJMDes desa Soreang Palipi tahun 2012-2017

**Tabel 3.9**

**Jenis Populasi ternak**

No	Ternak	Jumlah / Ekor
1.	Ayam	543 ekor
2.	Itik	234 ekor
3.	Kambing	604 ekor
4.	Sapi	26 ekor

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

**3.3. Kondisi Pemerintahan Desa Soreang Palipi**

**3.3.1. Pembagian Wilayah Desa Soreang Palipi**

Desa Soreang Palipi terdiri dari lima (5) wilayah dusun yaitu Dusun Lambe, dusun Kanappe, dusun Labu-labuang, dusun alinduang, dusun batu-batu. Pembagian wilayah Desa Soreang palipi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.10

**Tabel 3.10**

**Pembagian Wilayah Desa Soreang Palipi**

No	Nama Dusun	RT	RW	Nama Kepala Dusun
1	Lambe'	1		AM. Rasyid
2	Kanappe'	1		M. Daaming
3	Labu-labuang	1		Basman, S.Sos
4	Alinduang	1		Yusran Razak
5	Batu-batu	1		Jamal

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

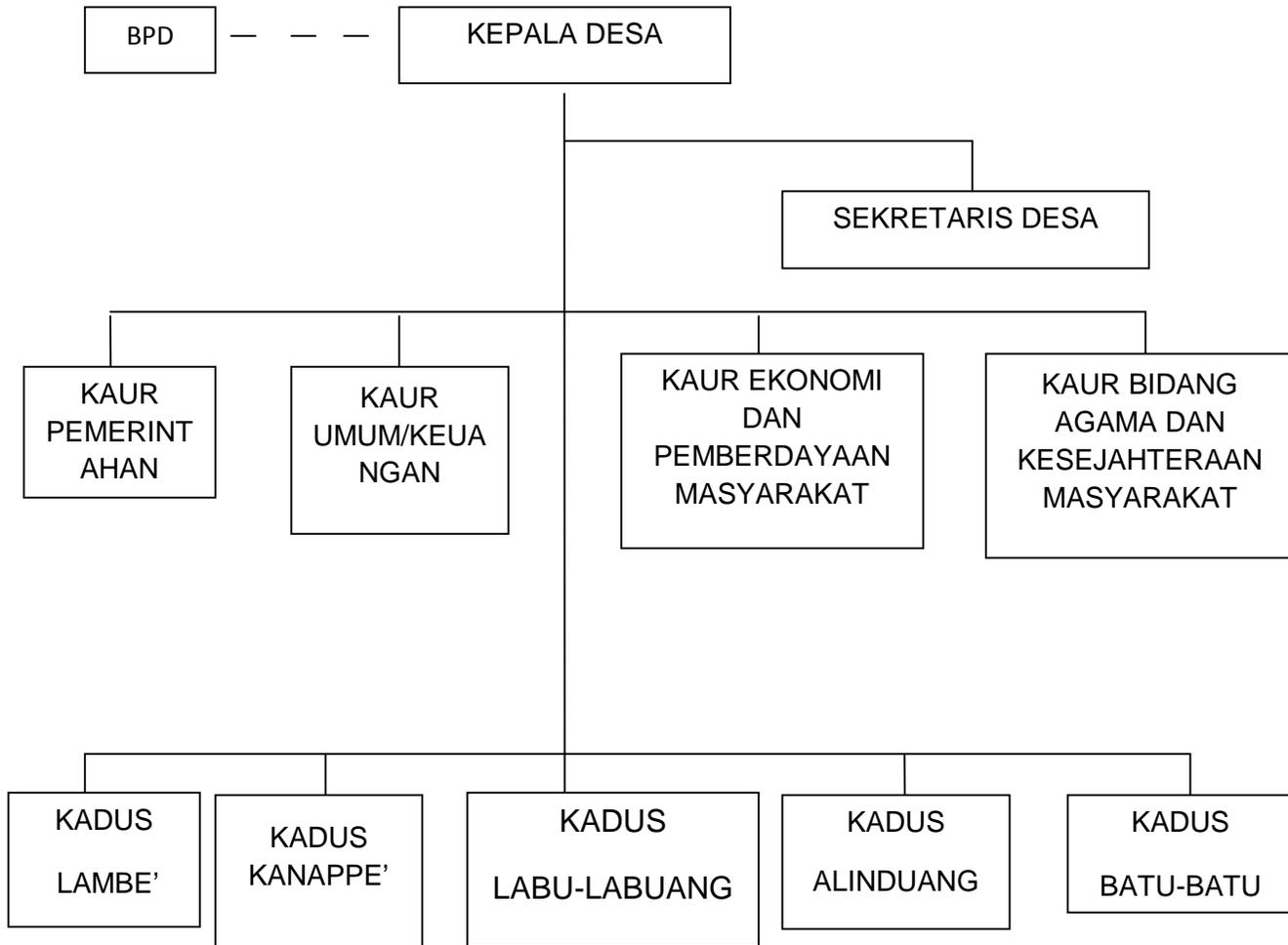
### **3.3.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Soreang Palipi**

Setiap instansi memiliki struktur organisasi yang khas dengan tujuan dan kebutuhan instansi. Dari struktur organisasi akan terlihat tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu instansi. Suatu struktur organisasi sangat menentukan bagaimana efisiensi instansi beroperasi. Struktur organisasi baik apabila dijalankan dengan konsekuen akan menjadi dasar yang kuat bagi tercapainya tujuan dan sasaran. Struktur organisasi pemerintah yang ada di desa Soreang Palipi dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 3.3

**Gambar 3.3**

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SOREANG PALIPI**

**(PERDA No : 02 Tahun 2012 )**



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dinamika politik tingkat lokal di Indonesia mengalami perkembangan pesat pasca diberlakukannya otonomi daerah melalui UU. No. 22 dan 25 Tahun 1999. Hal tersebut secara langsung telah mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang tadinya semua keputusan ada di pusat (sentralisasi kewenangan) menjadi daerah berperan aktif dalam menetapkan kebijakan sesuai kewenangan yang dilimpahkan (desentralisasi kewenangan). Dalam perjalanannya, dirasakan pelimpahan kewenangan (desentralisasi) masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga disempurkan menjadi UU. No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang otonomi dan desentralisasi fiskal. Terkait dengan UU tersebut, ditetapkan PP No. 25 Tahun 2000 dan PP 41 Tahun 2007, tentang Standar Operasional Tata Kewenangan, dimana secara konkueren (*ultravires*) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Artinya bahwa semakin banyak kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada Pemerintah Daerah oleh Pusat, akan mampu menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan kewenangan yang makin besar di tingkat lokal serta PP 129 Tahun 2000 memberikan peluang daerah melakukan pemekaran, maka

banyak daerah mengupayakan terjadinya pemekaran atau pemisahan wilayah.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah yang semakin menunjukkan respon yang sangat pesat dengan data yang memperlihatkan bahwa semenjak Oktober 1999 hingga Januari 2008 telah terbentuk 7 Provinsi, 134 Kabupaten dan 23 Kota sebagai hasil pemekaran (Pratikno, 2008), kini pemekaran tidak hanya berlaku di tingkatan provinsi maupun kabupaten / kota. Jauh dari itu, pemekaran telah terjadi di tingkatan yang lebih kecil lagi, yakni desa.

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa Di Wilayah Kabupaten Majene pasal 3. Pembentukan Desa Soreang Palipi tahun 2010 yang kemudian ditetapkan setahun setelahnya tertuang dalam Peraturan Desa Soreang Palipi nomor 1 tahun 2012. Sebagai desa hasil pemekaran, maka banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Dinamika desentralisasi yang mendorong terjadinya pemekaran wilayah menuntut pemerintah baru hasil pemekaran tidak hanya berkonsentrasi pada urusan politik. Pembangunan daerah baru selain dibutuhkan dukungan politik juga perlu inovasi dari pemerintah daerah dalam mengelola potensi daerah (desa) yang ada. Pengelolaan potensi desa secara tepat akan mendorong pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi desa perlu dikelola

secara efisien, oleh sebab itu diperlukan kebijakan pemerintah desa yang mampu bersaing sesuai karakteristik lokal, guna mencapai tingkat pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan

Menurut Taufiq C. Dawood (2007) ada dua alasan mengapa pemekaran banyak diusulkan oleh daerah. *Pertama*, desentralisasi memberikan dana yang lebih besar untuk dapat dikelola oleh setiap pemerintah daerah (khususnya Dana Alokasi Umum). *Kedua*, semangat Otonomi Daerah telah meningkatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah tanpa perlu memperoleh persetujuan Pemerintah di atasnya. Disamping dua alasan tersebut kiranya upaya pemekaran daerah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Dalam rangka optimalisasi peran pemerintah yang baru, maka segala “pernak-pernik” desa yang baru terbentuk perlu direncanakan secara matang guna memberikan pelayanan yang berkualitas, pembangunan yang sinergis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dibawah pemerintahan desa yang baru agar pemekaran desa tidak seakan-akan hanya pemborosan tata administratif wilayah kecamatan.

Dalam Perdes no 1 tahun 2012 inilah, dijabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soreang Palipi untuk tahun 2012 - 2017 selama lima tahun mendatang.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui, menjabarkan serta menganalisis penyelenggaraan pemerintahan desa hasil pemekaran dari tiga aspek yakni dari aspek pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel penelitian.

Studi ini dilaksanakan di Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Dalam Perdes nomor 1 tahun 2012 menyatakan pelaksanaan Pemerintahan Desa Soreang Palipi mengacu pada RPJM tahun 2012-2017 yang disusun berdasarkan visi, misi, agenda serta prioritas program pembangunan Desa Soreang Palipi. Selain itu, RPJM tersebut berkedudukan serta berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi aspirasi selama lima tahun sebagai upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki dan mengupayakan sumber daya lain untuk melaksanakan program-program pembangunan dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.

Dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini, selain melalui studi kepustakaan peneliti juga melakukan observasi serta *interview* (wawancara) kepada beberapa informan. *Interview* (wawancara) kepada informan dilakukan agar penulis mendapatkan informasi yang valid mengenai persoalan yang diteliti dari informan yang memiliki kaitan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran di Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

Informan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Bapak Kepala desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, **Wardin Wahid, SH**, Ketua Panitia Pembentukan Desa, **M. Daaming**, Perangkat desa yakni **Taslang S. Sos** selaku Kepala Urusan Pemerintahan dan **Zulkifli, SE** selaku Kepala Urusan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta tokoh masyarakat yakni **AM. Rasyid** (Kepala Dusun Lambe'), **M. Daaming** (Kepala Dusun Kanappe'), dan **Basman, S. Sos.** (Kepala Dusun Labu-Labuang) serta beberapa masyarakat yakni **Asyiah** dan **Yahya**

Dalam melaksanakan *interview* (wawancara), sebagai instrumen *interview* (wawancara) peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian dan mengacu kepada definisi operasional dan indikator-indikator ketiga variabel (pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pedoman wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum dan pertanyaan yang sifatnya mendetail. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat menghasilkan data yang akurat serta lengkap akan informasi yang dibutuhkan dalam studi ini.

#### **4.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Pelayanan**

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disemua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya

pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Fungsi pemerintahan baik pusat, daerah maupun desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa tersebut antara lain:

- a. Memberikan pelayanan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
- b. Memberikan pelayanan bidang kepemudaan dan olah raga
- c. Memberikan pelayanan bidang keagrariaan
- d. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang perkoperasian dan pengusaha ekonomi lemah
- e. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang kesehatan dan keluarga berencana
- f. Melakukan pelayanan di bidang kependudukan
- g. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang keagamaan (talak, rujuk, nikah, urusan kematian, zakat, infak dan sedekah)
- h. Memberikan pelayanan di bidang bantuan kemanusiaan akibat bencana alam dan lain-lain
- i. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang pengairan
- j. Melakukan pelayanan di bidang pajak dan retribusi

- k. Melakukan pelayanan kepada organisasi kemasyarakatan/ keagamaan/ kepemudaan/ keperempuanan, dan lainnya
- l. Membantu pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum (pemilu)

Pelayanan publik yang diberikan aparat pemerintah dalam suatu pemerintahan bukan lagi rahasia umum bahwa kebanyakan kualitasnya rendah. Namun hal ini tidak menjadikan alasan utama untuk bersikap pesimis atas perubahan yang mungkin terjadi dalam paradigma pelayanan yang aparat (pemerintah) pada posisi yang harus dilayani, tetapi harus berubah kepada paradigma yang menempatkan pengguna jasa (masyarakat) pada posisi yang lebih tinggi.

Upaya pergeseran paradigma yang dimaksud diatas secara ideal harus dimulai dari kemauan pemerintah melalui penyempurnaan kebijakan-kebijakan dibidang pelayanan. Oleh karena itu, pengguna jasa kearah pelayanan yang memuaskan pengguna jasa (masyarakat) disertai dengan perilaku pelayanan secara tertulis. Untuk dapat mencapai taraf pelayanan seperti ini, pelayan atau aparat tidak hanya dituntut harus menguasai teknik pelayanan (IQ) tetapi juga harus memiliki kesadaran emosional (EQ) agar tercapai pelayanan yang memuaskan dan sepenuh hati sesuai dengan standar pelayanan yang berkualitas.

Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat semakin baik,

merupakan indikasi empowering yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan keinginan dan aspirasi kepada pemerintah.

Kualitas pelayanan dapat ditinjau dari 5 (lima) aspek. Menurut Fitzsimmons dalam Sinambela (2007:7), kelima aspek tersebut merupakan dimensi kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kelima aspek tersebut untuk mengetahui kualitas pelayanan yang ada di Kantor Desa Soreang Palipi Kecamatan Banggae Kabupaten Majene.

#### **4.1.1 *Tangibles* (Bukti Nyata)**

*Tangibles* (bukti nyata) yaitu penampilan fasilitas-fasilitas fisik, perlengkapan, peralatan, penampilan pegawai, dan sarana komunikasi. Mengukur kualitas pelayanan sebuah organisasi apalagi jika pelayanan yang diberikan berupa fisik, maka salah satu aspek penting yang harus ditampilkan atau diwujudkan adalah adanya penampilan fisik berupa sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pelayanan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat yang pernah dilayani, Bapak M.Daaming bahwa:

*Secara keseluruhan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kantor Desa Soreang Palipi termasuk cukup baik untuk daerah pemekaran. (Wawancara, 25 Mei 2013).*

Dimensi Bukti Nyata merupakan kualitas pelayanan secara fisik perkantoran yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti yang dikemukakan Bapak M. Daaming, Ibu Asyiah selaku masyarakat biasa memberikan pendapat serupa, bahwa:

*Ruang pelayanan di kantor desa sudah sangat baik, masyarakat yang mendapat pelayanan merasa nyaman dan para aparat juga dalam berpenampilan menunjukkan kesadaran dalam artian mereka menggunakan seragam yang semestinya. (Wawancara, 29 Mei 2013)*

Berbeda dengan Bapak M. Daaming dan Ibu Asyiah. Bapak Yahya sebagai salah satu masyarakat biasa mengatakan bahwa;

*Kondisi ruang pelayanan dan fasilitas fisik yang ada di kantor desa sudah cukup baik tetapi masih begitu miris karena kantor desa itu bangunannya masih menumpang. Tetapi sebagai desa pemekaran kondisi ini bisa dimaklumi, masyarakat berharap tahun ini kantor Desa Soreang Palipi dibangun agar tidak menumpang lagi. (Wawancara 30 Mei 2013)*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa di kantor Desa soreang Palipi mulai dari kondisi ruang pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang dipakai oleh aparat sehari-hari sudah cukup baik dan cukup memadai untuk daerah pemekaran walaupun bangunan Kantor Desa masih menumpang.

Menyangkut kepegawaian di Kantor Desa Soreang palipi, kedisiplinan para pegawai lumayan bagus dalam hal ini adalah

menyangkut jam masuk kantor. Dari hasil pengamatan penulis, para pegawai masuk kantor paling lambat jam 09:00 pagi. Hal ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

#### **4.1.2 Reliability (Kehandalan)**

*Reliability* ( kehandalan ) yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan yang dijanjikan yang meliputi dua hal yaitu dapat dipercaya dan akurat ( tepat dan teliti). Nawawi dan Hadari (1990:121) menjelaskan bahwa keterampilan, keahlian dan kemampuan harus dimiliki aparatur dalam mencapai misi suatu organisasi yaitu bukan saja keterampilan teknis dalam mengisi suatu pekerjaan tetapi juga aparatur memiliki hubungan manusiawi (human skill) harus jelas manifestasinya sesuai dengan lapangan pekerjaan/jabatan memerlukannya, terutama untuk suatu pekerjaan yang banyak berkomunikasi/berinteraksi langsung dengan orang lain, baik didalam maupun diluar organisasi.

Dalam hal pemberian pelayanan dengan segera dan memuaskan, para aparat desa sudah memenuhi harapan masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yahya, bahwa:

*Masyarakat yang memiliki urusan akan segera dilayani dengan ketentuan telah memenuhi syarat yang ada. Kalau ternyata ada kesalahan maka dengan teliti aparat akan memperbaiki dan menjelaskannya. (Wawancara 30 Mei 2013)*

Ibu Asyiah juga mengemukakan hal yang sama dengan Bapak Yahya, bahwa:

*Orang-orang di Kantor Desa (aparatus) kemampuan mereka sudah lumayan, masyarakat tidak merasa kecewa dan puas dengan pelayanan yang ada. ( Wawancara 29 Mei 2013)*

Mengenai biaya/tarif, semua pengurusan dalam hal ini pengurusan administrasi kependudukan dan surat keterangan telah sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada pungutan-pungutan biaya lain yang dibebankan kepada masyarakat. Akan tetapi, kebiasaan turun temurun masyarakat setempat selalu memberikan “uang bensin” walaupun tidak diminta. Seperti yang dikemukakan Bapak M. Daaming bahwa:

*Setiap mengurus di Kantor Desa kami masyarakat selalu mengerti, kalau memang kami memiliki kami selalu memberikan “uang bensin” kepada aparat, aparat tidak meminta itu hanya itu tanda terima kasih kami karena dilayani dengan baik. (Wawancara 29 Mei 2013)*

#### **4.1.3 Responsiveness (Daya tanggap)**

*Responsiveness* (daya tanggap) yaitu keinginan untuk membantu masyarakat dan memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat. Daya tanggap yang diperlihatkan oleh aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.

Berkaitan dengan penilaian atau persepsi masyarakat, petugas cukup tanggap terhadap keluhan-keluhan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan, seperti yang dikemukakan Bapak M. Daaming, bahwa:

*Prosedur pelayanan sederhana dan mudah jadi bisa cepat selesai. Petugas juga melaksanakan tugas mereka dengan baik jarang ada masalah. (Wawancara, 1 Juni 2013)*

Hal serupa juga dikemukakan oleh Ibu Asyiah, bahwa:

*Sekarang tidak sulit lagi mendapatkan pelayanan, petugas selalu memberikan kemudahan. Jika kami ada urusan dan kepala desa tidak ada ditempat maka surat dapat dititip dan ditindak lanjuti petugas dan walaupun kami menunggu, tersedia fasilitas (TV) yang membuat kami nyaman atau tidak bosan di Kantor Desa. (Wawancara, 3 Juni 2013).*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa daya tanggap para aparat desa telah bagus. Masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan tetapi dipermudah.

#### **4.1.4 Assurance (Jaminan)**

*Assurance* (jaminan) yaitu pengetahuan, kesopanan, etika, dan moral para aparat dan kemampuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat. Dimensi jaminan merupakan salah satu dimensi yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan pelayanan pada sebuah organisasi.

Dalam hal sifat dapat dipercaya, para petugas dalam memberikan pelayanan telah selesai tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Proses pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Desa Soreang Palipi sebenarnya tidak membutuhkan waktu yang lama dengan kata lain menit atau jam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat diselesaikan. Pelaksanaan pelayanan di Kantor Desa Soreang Palipi

pada dasarnya hanya bersifat pelayanan singkat seperti pelayanan pemberian surat keterangan atau surat pengantar.

Dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, para aparat juga selalu bersifat sopan dan ramah. Bukan hanya dalam jam kerja ataupun hanya di dalam lingkungan kantor, tetapi di luar kantor juga para aparat menunjukkan sikap yang sama. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Daaming, bahwa:

*Para petugas di Kantor Desa selalu menunjukkan sikap sopan dan ramah. Masyarakat yang datang ke kantor selalu disapa terlebih dahulu. Bahkan bukan hanya dilingkungan kantor Desa, kalau ketemu di jalan pasti saling sapa juga. Hal ini juga karena di Desa Soreang Palipi ini hubungan kekerabatannya juga masih begitu dekat jadi aparat ataupun masyarakat biasa itu tidak ada kesenjangan di antaranya. (Wawancara, 27 Mei 2013)*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa jaminan akan pelayanan diberikan masuk dalam kategori memuaskan. Hubungan kekerabatan juga menjadi faktor akan kedekatan antara aparat dan masyarakat. Aparat juga sadar bahwa tugas mereka memberi kenyamanan dan sebagai pengayom masyarakat jadi harus menampilkan yang terbaik

#### **4.1.5 Empaty (Empati)**

*Empaty* (empati) yaitu tingkat kemampuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan pada dasarnya lebih tertuju pada dasarnya lebih tertuju pada aspek

manusia dalam organisasi, yaitu sikap dan perilaku yang ditampilkan aparat (petugas) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Perhatian aparat memberi pelayanan sebenarnya sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kadang ada masyarakat yang mesti mondar-mandir ke Kantor Desa karena tidak memenuhi syarat pengurusan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yahya, bahwa:

*Masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui mengenai persyaratan pengurusan di Kantor Desa sehingga mereka mesti mondar-mandir walaupun demikian aparat telah memperlakukan mereka dengan baik, dengan bersabar dan bersahabat menjelaskan apa yang mesti dipenuhi. ( Wawancara 26 Mei 2013 )*

Antara aparat dengan masyarakat memang harus menjalin komunikasi baik formal maupun informal. Hal itu untuk mengurangi jarak atau kesenjangan komunikasi yang seringkali membatasi diantara mereka. Dari penelitian ini penulis bisa melihat aparat dan masyarakat memiliki hubungan yang baik sehingga pelayanan juga berjalan dengan baik.

#### **4.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Pembangunan**

Dibentuknya pemerintah pada awalnya adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya

sebatas pelindung melainkan pelayan masyarakat. Rakyat tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan ataupun penjajahan namun justru pemerintah yang seharusnya melayani, mengayomi, dan mengembangkan serta meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sesuai tujuan negaranya. Fungsi pemerintah dalam Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

Sebagai desa hasil pemekaran yang tata pemerintahannya baru berjalan selama kurang lebih dua tahun, maka gerak laju pembangunannya masih perlu perumusan melalui pemikiran matang terkait potensi desa, dan masalah apa yang paling krusial yang dibutuhkan oleh desa untuk segera ditemukan solusi bersama.

Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa Soreang Palipi diputuskan secara musyawarah desa yakni Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrebangdes) yang dilaksanakan setelah lokakarya desa. Musrebangdes tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2012 di kantor desa. Tahapan penyusunan RPJM tersebut dibagi dalam tiga kegiatan besar yakni : (1) persiapan yakni analisis prioritas pembangunan desa melihat potensi

dan masalah yang paling penting untuk diselesaikan, (2) pelaksanaan RPJM, dan (3) pelebagaan yakni pemasyarakatan hasil musrembangdes melalui pertemuan-pertemuan formal maupun non formal warga, atau penyampaian secara personal dari aparat pemerintah desa (pemerintah desa dan atau tokoh masyarakat).

#### **4.2.1. Prasarana Desa**

Dalam hal pembangunan di bidang pengadaan prasana desa, telah dianalisis potensi masalah yang ada, kemudian dirumuskan secara berurut prioritas pembangunan di Desa Soreang Palipi. Hasil penentuan peringkat masalah di bidang pembangunan prasarana desa dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini :

**Table 4.1****Data Masalah dan Peringkat Masalah Desa Soreang Palipi**

No	Masalah	Dirasakan oleh orang banyak	Sangat parah	Menghambat peningkatan pendapatan	Sering terjadi	Tersedia potensi untuk memecahkan masalah	Jumlah nilai	Urutan peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanggul pantai	5	4	5	5	4	23	1
2.	Pemecah ombak	5	5	2	5	5	22	2
3.	Jalan tani	5	4	3	5	3	20	3
4.	Sarana air bersih	5	4	3	4	3	19	4
5.	Pasar desa	5	5	5	2	4	21	5
6.	Gedung	4	5	2	3	3	16	6
7.	TPA	5	5	5	3	4	22	7
8.	Gedung PKK	3	3	3	2	4	15	8
9.	SPAI	5	2	2	3	3	15	9
10.	Perbaikan jalan alternative	5	3	3	3	5	19	10
11.	Drainase	4	3	3	2	3	15	11
12.	Perpustakaan	5	3	3	3	3	17	12
13.	Bantuan perahu dan mesin nelayan	4	3	5	3	4	19	13
14.	Lapangan sepak bola	4	2	2	2	3	13	14
15.	Perpustakaan	4	3	3	2	3	15	15
16.	Pengadaan bangunan SLTP	4	2	4	5	4	19	16
17.	Halte bis	3	2	2	3	3	13	17
18.	Bantuan modal usaha	3	2	4	3	4	16	18
19.	Bantuan rumah layak huni	5	4	4	4	4	21	19
20.	Pappaluangan	3	2	2	2	3	12	20
21.	Dermaga	3	1	2	3	2	11	21
22.	Pengadaan bibit kelapa lokal	3	3	5	3	3	17	22

Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012

Seiring berjalannya tata pemerintahan yang baru di Desa Soreang Palipi, terhitung sejak disahkan hingga penelitian ini dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa telah ada beberapa prasarana desa yang

berhasil dibuat (namun kondisinya sudah kurang baik) yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya pemecah ombak yang rusak akibat pengikisan oleh ombak yang sangat besar (abrasi). Pembangunan prasarana desa lainnya yang telah ada, yakni sarana air bersih serta tanggul pantai. Kondisi keduanya masih terbilang baik.

Seperti yang dikemukakan Bapak Basman, S.Sos bahwa:

*Sejak pemekaran, sudah ada pembangunan walaupun masih minim malah kondisinya sudah rusak, contohnya pemecah ombak di dusun Lambe'. Selain itu ada satu sarana air bersih di dusun Kanappe' dan tanggul pantai. Hal ini wajar untuk desa pemekaran yang umurnya baru menjelang 2 (dua) tahun. (Wawancara, 3 Juni 2013)*

Hal serupa juga dikemukakan Bapak Wardin Wahid, bahwa:

*Pembangunan fisik di desa ini sejak pemekaran belum bisa terlihat namun yang sangat dirasakan masyarakat sekitar itu sarana air bersih dan tanggul pantai. Desa yang berbatasan dengan laut lepas sangat rentan mengalami pengikisan, keberadaan tanggul pantai dan pemecah ombak itu membantu walaupun kondisi pemecah ombak saat ini sudah rusak lagi. (Wawancara, 23 Mei 2013)*

#### **4.2.2. Kebutuhan Dasar**

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Kebutuhan dasar mencakup pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pemukiman (tempat tinggal yang layak). Dalam hasil RPJM Desa Soreang Palipi dapat dilihat program pemenuhan kebutuhan dasar.

Misalnya, pada pemenuhan kebutuhan dasar pengadaan pemukiman bagi warga kurang mampu telah diupayakan melalui

program bedah rumah. Bantuan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu / miskin agar dapat menghuni rumah yang layak huni prosesnya telah sampai pada pendataan agar tepat sasaran.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak A.M Rasyid bahwa:

*Masyarakat desa Soreang Palipi masih begitu perlu bantuan pemukiman layak huni, pemerintah sudah melakukan pendataan bulan ini. (Wawancara, 1 Juni 2013 )*

Tidak jauh berbeda dengan bapak A.M Rasyid, Bapak Taslang, S.Sos membenarkan adanya program ini, bahwa:

*Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti pengadaan pemukiman layak huni itu belum terealisasi, tetapi pemerintah sudah mengadakan pendataan. Program Bedah Rumah ini digilir pemerintah, desa Soreang Palipi tahun ini pendataan, insyaAllah tahun depan sudah terealisasi dan dapat dinikmati masyarakat. (Wawancara, 2 Juni 2013)*

Dibidang ekonomi, program pembangunan Desa Soreang Palipi merupakan sebuah program pemberdayaan bagi masyarakat desa dimana diharapkan bagi nelayan dan petani dapat meningkatkan hasil produksi perikanan, pertanian, dan perkebunan, baik kualitas maupun kuantitas. Program pembangunan berbasis pemberdayaan yang sementara diupayakan tersebut akan dikoordinasikan oleh kelompok tani dan kelompok nelayan yang ada sehingga dapat melaksanakan aktivitas terorganisasi secara bersamaan.

Beberapa kegiatan dari program pembangunan yang akan dilaksanakan seperti pelatihan kelompok nelayan, bantuan peralatan tani (bantuan pupuk, obat-obatan, serta bibit unggul bagi petani). Untuk mendukung program tersebut akan dibangun pula sarana infrastruktur pendukung seperti sarana perikanan, jalan tani, dan jalan desa.

Menurut Bapak Zulkifli, SE bahwa :

*Banyak hal yang mau dibenahi di Desa Soreang Palipi, terutama di bidang ekonomi. Masyarakat yang mata pencahariannya dominan pada sector perikanan dan pertanian akan mendapatkan pelatihan yang bermanfaat agar pendapatannya mengalami peningkatan. Hanya saja bulan-bulan seperti ini banyak masyarakat yang melakukan penangkapan hingga ke Pulau Lombok dan Kalimantan jadi setelah Ramadhan program ini bisa berjalan, saat para nelayan kembali berlayar. (Wawancara, 3 Juni 2013)*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa pemerintah telah mengupayakan pembangunan-pembangunan baik fisik dan nonfisik. Namun bangunan yang ada juga telah mengalami kerusakan dan dan juga adanya hambatan-hambatan seperti kelompok nelayan yang tidak jalan karena nelayan melakukan pelayan hingga ke pulau seberang.

#### **4.3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Soreang Palipi dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga

meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008). Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta lebih khusus pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan mulia dilakukannya pembangunan daerah, dalam konteks pemekaran daerah adalah kesejahteraan.

#### **4.3.1. Tingkat Pendapatan**

Masyarakat Desa Soreang Palipi lebih dominan bekerja di sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan. Secara umum keadaan ekonomi mereka masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh Sumber daya Manusia (SDM) yang masih kurang. Selain itu, SDM yang tersedia juga masih menggunakan peralatan yang sederhana sehingga pendapatan masih sangat rendah. Bekerja pada bidang tersebut yang notabenehnya masih kurang optimal dilaksanakan akibat keterbatasan disana-sini, berimplikasi terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada umumnya belum mampu terangkat. Hal ini membawa pada suatu asumsi bahwa bekerja pada bidang ekonomi yang menjadi potensi desa tersebut saja belum mampu mengangkat, apalagi kemudian bekerja pada sektor-sektor lainnya.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Zulkifli, SE bahwa:

*Dominan masyarakat Soreang Palipi masuk dalam kategori miskin, pemenuhan kebutuhan setiap hari sering mengalami kesulitan. Pekerjaan masyarakat yang dominan sebagai nelayan hanya menghasilkan pendapatan sedikit karena alat yang masih begitu tradisional. (Wawancara, 27 Mei 2013)*

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Wardin Wahid, SH bahwa:

*Pola pikir masyarakat Desa Soreang Palipi perlu mengalami metamorphosis, kepercayaan masyarakat yang menganggap diri mereka benar-benar nelayan tangguh ketika melakukan pelayaran hingga ke pulau seberang itu salah. Potensi perikanan disekitar perairan dekat Desa juga sangat menghasilkan hanya perlu digalih dan dikembangkan. (Wawancara, 25 Mei 2013)*

Secara klasifikasi, kesejahteraan masyarakat desa Soreang Pallipi di bidang kesejahteraan ekonomi (pendapatan), dapat dilihat pada table berikut :

**Table 4.2**

**Klasifikasi Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

**Desa Soreang Pallipi**

No	Jenis kelamin	Jumlah penduduk dewasa (jiwa)	Jumlah penduduk miskin (jiwa)	Klasifikasi tingkat kesejahteraan	
				Sejahtera (KK)	Pra sejahtera (KK)
1.	Laki-laki	913	891	10	-
2.	Perempuan	865	855	19	-
Total		1778	1746	29	-

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Adapun mengenai sektor-sektor andalan ladang mata pencaharian masyarakat desa Soreang Palipi selama ini yang dapat menghasilkan usaha produktif, antara lain

**Table 4.3**

**Hasil Usaha Produktif Desa Soreang Palipi**

<b>No.</b>	<b>Sektor</b>	<b>Hasil usaha</b>	<b>Ket</b>
1.	Nelayan	Ikan	
2.	Pertanian	Ubi kayu Pisang	
3.	Perkebunan	Kelapa	
4.	Produksi / kerajinan	Produksi minyak kelapa Produksi pupuk organik Produksi sarung sutera	

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa tingkat pendapatan masyarakat Desa Soreang Palipi masih begitu rendah. Sumber daya Manusia (SDM) dan peralatan menjadi penghambat peningkatan pendapatan masyarakat setempat.

**4.3.2. Tingkat Pendidikan**

Di bidang pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih kurang. Diidentifikasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat desa akan pentingnya pendidikan yang sudah cukup baik, belum mampu didukung dengan sarana dan akses terhadap aktifitas pendidikan berupa sekolah yang memadai.

Pada tabel berikut dapat dilihat jumlah lembaga pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal.

**Tabel 4.4****Jumlah Lembaga Pendidikan Formal**

No.	Jenjang pendidikan	Jumlah	Status	Jmlh tenaga pengajar		Jmlh siswa
				PNS	Honoror / Sukarela	
1.	TK	1	-	4	2	65
2.	SDN No.22 Soreang	1	Negeri	8	2	176
3.	SDN No. 52 Pallipi	1	Negeri	10	7	120
4.	PAUD	2	Negeri	-	4	30

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

**Tabel 4.5****Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal**

No.	Jenjang	Jumlah	Status	Kepemilikan	Jumlah Tenaga Pengajar	Jumlah Siswa
1.	Paket A	-	-	-	-	-
2.	Paket B	1	Terdaftar	Yayasan	1 orang	6 orang
3.	Buta Aksara	-	-	-	-	-

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Selain data diatas, dari hasil observasi ditemukan bahwa minat anak-anak serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak cukup baik. Dapat dilihat pada kenyataan bahwa keterbatasan terhadap akses pendidikan didalam desa yang baru berjalan dua tahun masa pemekarannya tidak menyurutkan minat memperoleh pendidikan. Misalnya, untuk jenjang pendidikan selanjutnya setelah Sekolah Dasar (SD) yakni Sekolah Menengah

Pertama (SMP) masyarakat desa harus menyekolahkan anak-anak mereka ke desa sebelah yang memiliki gedung SMP tersebut yang jaraknya sekira 2 (dua) kilometer maupun ke kota yakni sekira 4 (tiga) kilometer. Sedangkan untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni ke ibukota kabupaten sekira 7,5 (tujuh koma lima) kilometer. Tidak jarang pula ada yang menempuh jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi yang ada di kota.

Seperti yang dikemukakan Bapak Taslang, S. Sos, bahwa:

*Sarana pendidikan di Desa ini hanya Sekolah Dasar (SD) dan PAUD untuk pendidikan formal, tapi bukan berarti jenjang pendidikan masyarakat rendah. Masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan sehingga walaupun jaraknya jauh anak-anak mereka tetap disekolahkan. Terkadang untuk meminimkan biaya maka anak-anak melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di desa Bonde atau kalau orang tua mereka tergolong mampu maka dilanjutkan di kota. (Wawancara 27 Mei 2013)*

Dari data potensi sumber daya manusia diperoleh data jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh beberapa masyarakat desa Soreang Palipi.

**Tabel 4.6**

**Potensi SDM Desa Soreang Palipi Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

<b>No.</b>	<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Tamat S1	35 orang
2.	Tamat D3	20 orang
3.	Tamat D2	1 orang
4.	Tamat SMK	23 orang
5.	Tamat SLTA	68 orang
6.	Tamat SLTP	124 orang
7.	Tamat SD	394 orang

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Secara keseluruhan dari hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis, bahwa sarana yang kurang dan akses yang cukup jauh tidak menyurutkan minat masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dengan peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya.

**4.3.3. Tingkat Kesehatan**

Secara signifikan, pasca terbentuknya Desa Soreang Palipi tahun 2010 sebagai desa hasil pemekaran, belum didapatkan data perubahan yang cukup berarti dari tingkat kesehatan yang dapat dilihat hanyalah berupa gedung pelayanan kesehatan yang memang telah ada sebelum pemekaran dan hanya membutuhkan perawatan.

**Tabel 4.7**

**Sarana Kesehatan Desa Soreang Palipi Tahun 2012**

No.	Uraian	Lokasi	Kondisi
1.	PUSTU	Dusun Alinduang	Baik (dibangun tahun 2008)
2.	POSYANDU	Dusun Alinduang	Baik (dibangun tahun 2008)
3.	POSYANDU	Dusun Lambe'	Baik (dibangun tahun 2010)

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu tokoh masyarakat, Bapak Basman, S.Sos bahwa:

*Untuk tingkat kesehatan, masyarakat Desa Soreang Palipi cukup baik tapi tetap mesti diadakan penyuluhan-penyuluhan kesehatan sebagai pencegah. Sarana kesehatan di Desa Soreang Palipi sejak pemekaran belum mengalami perubahan karena kondisinya juga masih baik Cuma perlu perawatan saja. (Wawancara, 3 Juni 2013)*

**Table 4.8**

**10 Penyakit Terbanyak di Derita Masyarakat Desa Soreang Palipi**

No	Penyakit	Bulan										
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov
1	Ispa	38	87	44	27	76	90	33	28	67	-	-
2	Gatal	14	15	5	21	33	31	3	5	2	-	-
3	Diare	3	14	5	1	9	12	1	4	3	6	-
4	Kecelakaan	5	11	8	3	22	29	-	-	-	3	-
5	Gastritis	6	10	6	1	19	18	6	3	13	3	6
6	Reumatik	3	9	5	2	15	12	1	-	5	1	7
7	Cacingan	6	10	3	2	9	10	5	4	2	-	6
8	Conjungtivitis	4	1	-	-	3	6	3	1	-	2	5
9	Anemi	10	27	4	15	30	20	9	6	10	10	3
10	Hipertensi	3	1	-	3	1	8	5	3	12	6	7
	Jumlah	92	185	80	75	217	236	66	54	114	31	34

*Sumber : Kantor Desa Soreang Palipi, Tahun 2012*

Tingkat kesehatan masyarakat desa Soreang Palipi bisa dilihat pada tabel 4.8. Ada 10 penyakit terbanyak di derita masyarakat desa

Soreang palipi yang tercatat di Pustu Desa Soreang Palipi. Setiap bulan jumlah penderita mengalami naik turun namun tidak dipungkiri kesadaran masyarakat untuk menggunakan sarana desa semakin meningkat. Masyarakat semakin sadar untuk menjaga kesehatan.

Berikut ini adalah perspektif pemerintah dan masyarakat mengenai tingkat perubahan penyelenggaraan pemerintahan desa Soreang Palipi pasca pemekaran

**Table 4.9**

**Perspektif Pemerintah dan Masyarakat tentang Pemecahan Masalah Desa**

No	Masalah Sebelum Pemekaran	Perspektif Pasca Pemekaran	
		Pemerintah	Masyarakat
1	Pelayanan	Maksimal	Maksimal
2	Pembangunan	Dalam Proses	Dalam Proses
3	Kesejahteraan	Belum Maksimal	Belum Maksimal

Berdasarkan Table 4.9 mengenai perspektif pemerintah maupun masyarakat mengenai masalah sebelum pemekaran diantaranya pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan. Dari segi pelayanan, pemerintah maupun masyarakat memiliki pandangan yang sama akan perubahan pasca pemekaran, ada peningkatan pelayanan. Maksimalnya pelayanan pasca pemekaran itu dikarenakan alur pelayanan sudah semakin dekat dan daya tanggap para aparat desa telah bagus. Masyarakat tidak lagi mengalami

kesulitan tetapi dipermudah dalam mengurus apapun itu. Jaminan akan pelayanan diberikan masuk dalam kategori memuaskan. Hubungan kekerabatan juga menjadi faktor akan kedekatan antara aparat dan masyarakat sedangkan dari aspek pembangunan masih begitu minim karena dalam proses . Sebagai desa hasil pemekaran yang tata pemerintahannya baru berjalan selama kurang lebih dua tahun, maka gerak laju pembangunannya masih lambat. Pemerintah telah mengupayakan pembangunan-pembangunan baik fisik dan nonfisik tetapi dari aspek kesejahteraan belum dirasakan. Walaupun tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta lebih khusus pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tapi Desa Soreang Palipi belum bisa merasakan perubahan yang berarti. Faktor ini bukan karena penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai melainkan usia dari desa ini yang masih begitu muda.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada BAB IV telah diuraikan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemekaran

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran dari aspek pelayanan dinilai telah maksimal dalam artian memuaskan masyarakat. Dari sisi tangibles (bukti nyata) kantor Desa soreang Palipi mulai dari kondisi ruang pelayanan, penyediaan sarana dan prasarana yang dipakai oleh aparat sehari-hari sudah cukup baik dan cukup memadai untuk daerah pemekaran walaupun bangunan Kantor Desa masih menumpang. Untuk reliability (kehandalan) pemberian pelayanan dengan segera dan memuaskan, para aparat desa sudah memenuhi harapan masyarakat. bahwa daya tanggap para aparat desa telah bagus. Masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan tetapi dipermudah dalam mengurus apapun itu. Jaminan akan pelayanan diberikan masuk dalam kategori memuaskan. Hubungan kekerabatan juga menjadi faktor akan kedekatan antara aparat dan masyarakat. Aparat juga sadar bahwa tugas mereka memberi kenyamanan dan sebagai pengayom masyarakat jadi harus menampilkan yang terbaik. Antara aparat

dengan masyarakat memang harus menjalin komunikasi baik formal maupun informal. Hal itu untuk mengurangi jarak atau kesenjangan komunikasi yang seringkali membatasi diantara mereka. Dari penelitian ini penulis bisa melihat aparat dan masyarakat memiliki hubungan yang baik sehingga pelayanan juga berjalan dengan baik.

2. Penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran dari aspek pembangunan masih begitu minim. Sebagai desa hasil pemekaran yang tata pemerintahannya baru berjalan selama kurang lebih dua tahun, maka gerak laju pembangunannya masih lambat. Pemerintah telah mengupayakan pembangunan-pembangunan baik fisik dan nonfisik. Namun bangunan yang ada juga telah mengalami kerusakan dan juga adanya hambatan-hambatan seperti kelompok nelayan yang tidak jalan karena nelayan melakukan pelayaran hingga ke pulau seberang., Pemerintah melakukan pembangunan secara bertahap, dan masalah krusial yang lebih di utamakan.
3. Penyelenggaraan pemerintahan pasca pemekaran dari aspek kesejahteraan belum dirasakan. Walaupun tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta lebih khusus pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tapi Desa Soreang Palipi belum bisa merasakan perubahan yang berarti. Faktor ini bukan karena penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai melainkan usia dari desa ini yang masih begitu muda.

## 5.2 Saran

1. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dari aspek pelayanan sebaiknya prestasi yang telah ada dipertahankan, hanya perlu sedikit polesan- polesan agar lebih baik lagi. Pengadaan kantor desa akan membuat pelayanan lebih maksimal lagi.
2. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dari aspek pembangunan hendaknya pemerintah desa bergerak cepat melakukan pembenahan terutama pembangunan dalam hal menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat erat keterkaitannya dengan pembangunan. Maka sebaiknya pembangunan terutama pembangunan penunjang peningkatan kesehatan, pembangunan penunjang peningkatan pendapatan serta pembangunan penunjang peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi prioritas agar masyarakat sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

Nurcholis Hanif.,2011. ***Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa***, Erlangga, Jakarta.

Nugroho Riant, 2000. ***Desentralisasi Tanpa Revolusi***. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo

Pamudji, S. 1985. ***Kerjasama Antar Daerah***. Jakarta: PT. Bina Aksara

Purwadarminto, WJS. 1984, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***. Jakarta: Balai Pustaka

Ratnawati Tri, 2006. ***Potret Pemerintahan Lokal di Indonesia di Masa Perubahan***. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Riwu Kaho, Josef. 2005. ***Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suyanto Bagong, Sutinah, 2010. ***Metode Penelitian Sosial***. Jakarta: Kencana.

Widjaja, HAW, 2009. ***Otonomi Daerah dan Daerah Otonom***. Jakarta: Rajawali Pers

Widjaja, HAW, 2003. ***Otonomi Desa***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Widjaja, HAW, 2005. ***Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

### B. Peraturan Perundang - Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kelurahan Menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan Menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Majene

Peraturan Desa Soreang palipi Nomor 001/I/2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soreang Palipi

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Media Grafika Utama, Yogyakarta.

### **C. Data Online**

[http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1\\_la&aid=247&Spirit%20Publik](http://perpustakaan.uns.ac.id/jurnal/index.php?act=view&id=1_la&aid=247&Spirit%20Publik)

<http://journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/526/438>

<http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11207185202.pdf>

<http://2frameit.blogspot.com/2012/03/sekelumit-pemikiran-tentang-desa.html>

<http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Pemekaran-Wilayah.pdf>

<http://minbar2009.wordpress.com/2011/02/26/dasar-hukum-pemekaran-wilayah-pembentukan-kabupaten-baru/>

<http://pramudjapk.blogspot.com/2010/02/problematika-pemekaran-daerah-teori.html>

# LAMPIRAN

**RENCANA PEMBANGUNA JANGKA MENENGAH DESA SORANG PALIPI TAHUN : 2012-2017**  
**KECAMATAN BANGGAE KABUPATEN MAJENE**

Urutan	Kegiatan	Tujuan	Lokasi	Pertkiraan Biaya (Rp)	Tahun Pelaksanaan
Wajib	Tanggul Sepanjang 2000 m	Menahan ancaman Abrasi sepanjang Desa Sorang Palipi	Desa Sorang Palipi	2,700.000.000	2013
Wajib	Pemecah ombak 500 m	Membendung besarnya ombak sampai ke pantai	Semua dusun	1.500.000.000	2013
Wajib	Air bersih	Masyarakat dapat menikmati air bersih dan sehat secara umum	Semua Dusun		2013
Pilihan	Jalan tani 400 m	Peran lebih mudan membawa hasil panennya sampai di rumah	Labu-lubuung, Alincuang Batu-batu	191.640.000	2013
Pilihan	Pengiriguan 100 Ha	dapat menepoh lenir dan legur pada musim hujan	Semua dusun	262.500.000	2013
Wajib	Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 1000 m	Memperlancar saluran air limbah dan sekaligus menghindari penyakit yang ditimbulkan oleh air yang tergenang	Semua dusun	320.000.000	2013
Wajib	Perbaikan jalan Desa 350 m	Memudahkan jalan bagi pengguna kendaraan umum dan pengguna jalan	Dusun Lamoer, dusun Labu-lubuung	275.260.000	2013
Pilihan	Bantuan perahu nelayan 10 unit dan mesin 20 unit dan peralatan yang Canggih, JPS, Hifender	Untuk meningkatkan hasil produksi tangkapan ikan bagi masyarakat nelayan dalam meningkatkan taraf hidup	Semua dusun	900.000.000	2013
Wajib	Bantuan rumah layak huni 50 unit	supaya masyarakat yang kurang mampu/misra dapat menghuni rumah	Semua dusun	750.000.000	2013

		yang layak hasil				
10	Wajib	Pasar desa 1 unit	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperlancar roda perekonomian di Desa Sorang Palipi	Desa Sorang Palipi	400.000.000	2013
11	Pilihan	Papilubangan 2 unit	Mempermudah akses keluar masuknya perahu bagi para nelayan	Labu-lubuung	500.000.000	2013
12	Wajib	Pepustakaan 1 unit	Meningkatkan minat baca bagi masyarakat yang ada di Desa Sorang Palipi dan sekaligus dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa ,pelajar dan masyarakat pada umumnya	Desa Sorang Palipi	250.000.000	2013
13	Wajib	Baitir 2 unit	Sebagai tempat menunggu kendaraan bagi nelayan	Keneppa', Alinduang	550.000.000	2013
14	Wajib	Drainase 500 m	Memperlancar saluran air dari gunung pada musim hujan supaya terhindar dari ancaman banjir	Alincuang batu-batu	35.000.000	2013
15	Wajib	Lapangan sepak bola desa 1 unit	Sebagai tempat sarana bagi remaja dalam menyalurkan bakat persapak bola secara umum	Desa sorang palipi	750.000.000	2013
16	Wajib	PAUD 2 unit	Menambah pengetahuan anak usia dini	Alinduang, Labu-lubuung	500.000.000	2013
17	Pilihan	dermaga	Sebagai tempat aktifitas masyarakat nelayan melakukan bongkar muat hasil tangkapan	Labu-lubuung	500.000.000	2013
18	Wajib	Pengadaan lapangan SLTP 1 unit	Agar supaya tamatan yang ada di desa	Desa Sorang Palipi	30.000.000	2013

			seorang palipi lebih dekat untuk melanjutkan pendidikan ke SLIP			
9	Pilihan	Pengadaan bibit perkebunan (kayu lera) 1000 pohon	Menambah hasil produksi dalam bidang pertanian khususnya produksi minyak kelapa yang merupakan ciri khas masyarakat mader.	Semua Dusun	30.000.000	2013
0	wajib	Investasi modal usaha 25 kios	meningkatkan usaha perekonomian masyarakat agar taraf hidupnya lebih baik	Semua Dusun	300.000.000	2013
1	wajib	Gedung dan panggung seni	Sebagai tempat penerimaan masyarakat dan panyaluran bekal seni untuk remaja putra dan putri masyarakat Desa Soreang Palipi pada umumnya.	Desa Soreang Palipi	100.000.000	2013
2	wajib	Gedung PKK, serana Bersalin	Sebagai tempat kegiatan pembangunan serba kesibukan masyarakat Desa Soreang Palipi	Desa Soreang Palipi	250.000.000	2013
3	Wajib	Jamban Keluarga	Sebagai Semesta Keselamatan Masyarakat	Semua Dusun	90.000.000	2013

Labu-labu, 31 Januari 2012



JANA PEMBANGUNAN DESA (JRP-DESA) TAHUNAN

REKAM SOAL

Kegiatan	Incasi	No Urut	Sasaran/ni efas:	status			RAS /sumber dana			Tahun Pelaksanaan					
				B	L	R	APBD	APBD desa	total	2013	2014	2015	2016	2017	
2	3	4	5	7	8	9	11		12						
Gedung SMP	Desa Soreang Palipi	1 unit		✓	-	-	Rp	400.000.000	-	Rp	400.000.000				✓
Perpustakaan Desa	Desa Soreang Palipi	1 unit		✓	-	-	Rp	250.000.000	-	Rp	250.000.000		✓		
Rumah Layak Huni	Desa Soreang Palipi	50 unit		✓	-	-	Rp	350.000.000	-	Rp	350.000.000		✓		
Larangan Sepak bola	Desa Soreang Palipi	1 unit		✓	-	-	Rp	300.000.000	-	Rp	300.000.000			✓	
PMD	Desa Soreang Palipi	1 Unit		-	✓	-	Rp	300.000.000	-	Rp	300.000.000		✓		
Sangat seni	Desa Soreang Palipi	2 Unit		✓	-	-	Rp	250.000.000	-	Rp	250.000.000				✓
Pelatihan Kader PKK	Desa Soreang Palipi	20 Orang		✓	-	-	Rp	35.000.000	-	Rp	35.000.000	✓			
Pembinaan Rp. Nelayan	Desa Soreang Palipi	30 Rp		✓	-	-	Rp	350.000.000	-	Rp	350.000.000	✓			
Pembinaan SDM	Desa Soreang Palipi	50 Orang		✓	-	-	Rp	100.000.000	-	Rp	100.000.000	✓			
Pembinaan Permata Desa	Desa Soreang Palipi	25 Orang		✓	-	-	Rp	100.000.000	-	Rp	100.000.000		✓		
Pemb. Gedung PKK	Desa Soreang Palipi	1 Unit		✓	-	-	Rp	200.000.000	-	Rp	200.000.000	✓			
Pembangunan Gedung TK	1 Dusun	1 Unit		✓	-	-	Rp	100.000.000	-	Rp	100.000.000				✓
Pembangunan Gedung Futsal	Desa Soreang Palipi	1 Unit		✓	-	-	Rp	200.000.000	-	Rp	200.000.000				✓
JUMLAH							Rp	3.335.000.000		Rp	3.335.000.000				

Labu-labu, 31 Januari 2012



REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

ANG EKONOMI

Kegiatan	Indek	Volume	Sasaran/m manfaat	Status			RAB / sumber dana			Tahun Pelaksanaan						
				B	L	R	APBD	APBD desa	total	2013	2014	2015	2016	2017		
				7	8	9	11		12							
Diras Tani	semua Dusun	500 M		√	-	-	Rp	200.000.000	-	Rp	200.000.000		√			
Pengalokasian	semua Dusun	100 Ha		√	-	-	Rp	202.000.000	-	Rp	202.000.000			√		
SBN Persebaran	semua Dusun	1000 Pohon		√	-	-	Rp	90.000.000	-	Rp	90.000.000				√	
Manajemen PPD, M.F	semua Dusun	25 Kip		√	-	-	Rp	250.000.000	-	Rp	250.000.000	√				
Pembinaan Agrib. Petang	semua Dusun	20 Kip		√	-	-	Rp	100.000.000	-	Rp	100.000.000			√		
Pembinaan Perahu Samudra	1 Dusun	1 Unit		√	-	-	Rp	60.000.000	-	Rp	60.000.000			√		
Pembinaan ES balok	1 Dusun	1 Unit		√	-	-	Rp	10.000.000	-	Rp	10.000.000			√		
Pembinaan Pohon bakau	1 Dusun	100 M		√	-	-	Rp	20.000.000	-	Rp	20.000.000					√
Pengadaan Tenda GPP	1 Dusun	1 Unit		√	-	-	Rp	10.000.000	-	Rp	10.000.000			√		
Pembinaan rumah idukang	Desa Sireang Palipi	3 unit		√	-	-	Rp	125.000.000	-	Rp	125.000.000					√
<b>JUMLAH</b>								Rp 1.087.000.000		Rp 1.087.000.000						

Labuabuung 31 Januari 2012



REKAPITULASI RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) TAHUNAN

ANG PEKERJAAN UMUM

Kegiatan	Indek	Volume	Sasaran/m manfaat	Status			RAB / sumber dana			Tahun Pelaksanaan						
				B	L	R	APBD	APBD desa	total	2013	2014	2015	2016	2017		
				7	8	9	11		12							
Tengkul	semua Dusun	2000 M		√	-	-	Rp	2.400.000.000	-	Rp	2.400.000.000	√				
Pemecah Cangkak	semua Dusun	1500 M		√	-	-	Rp	1.500.000.000	-	Rp	1.500.000.000	√				
Koridor desa	1 Dusun	350 M		√	-	-	Rp	275.000.000	-	Rp	275.000.000	√				
Pasar Desa	Desa Sireang Palipi	1 Unit		√	-	-	Rp	400.000.000	-	Rp	400.000.000	√				
Halte Bus	2 Dusun	2 unit		√	-	-	Rp	300.000.000	-	Rp	300.000.000		√			
Pappalangan	2 Dusun	2 Unit		√	-	-	Rp	500.000.000	-	Rp	500.000.000		√			
Peremaga	1 Dusun	1 Unit		√	-	-	Rp	500.000.000	-	Rp	500.000.000					√
Gedung serba guna	Desa Sireang Palipi	1 Unit		√	-	-	Rp	200.000.000	-	Rp	200.000.000		√			
Pembinaan Jalan	2 Dusun	2 Km		√	-	-	Rp	500.000.000	-	Rp	500.000.000					√
Pagar Halaman	semua Dusun	1,4 Km		√	-	-	Rp	50.000.000	-	Rp	50.000.000			√		
<b>JUMLAH</b>								Rp 7.075.000.000		Rp 7.075.000.000						

Labuabuung 31 Januari 2012



RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RPD-DESA) TAHUNAN

BIDANG KESEHATAN

No	kegiatan	lokasi	jumlah	seserang/m manfaat	status			RA3 / sumber dana			Tahun Pelaksanaan				
					B	L	R	APBD	APBD desa	total	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	7	8	9	11		12					
1	Sarana Air Bersih	Desa Dusan	144 Klt					Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	✓				
2	MCK	Desa Dusan	150 Klt		-	V	-	Rp. 175.000.000	-	Rp. 175.000.000					✓
3	Pemagaran Poyandri/Pusat	Desa Dusan	2 Unit/1 Unit		-	V	-	Rp. 125.000.000	-	Rp. 125.000.000	✓				
4	Drainase	Alindang, Batu batu	500 M		✓	-	-	Rp. 350.000.000	-	Rp. 350.000.000	✓				
5	SPAL	Desa Dusan	1 Km		✓	-	-	Rp. 120.000.000	-	Rp. 120.000.000		✓			
6	pengadaan Ambulans Motor	Unit Siring Palit	1 unit		✓	-	-	Rp. 10.000.000	-	Rp. 10.000.000				✓	
Jumlah								Rp. 1.250.000.000		Rp. 1.250.000.000					

31 Januari 2012  
 Kepala Desa Siring Palit  
 WARDI WARDI, SH

REKAPITULASI USULAN TAHUN 2015

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Biaya	
						B	L	R	Per luas dan	(Rp)	Sumber
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Tanggap	Mengurangi Anaku	Desa Dusan	umum	1000 M	✓				Rp. 2.400.000.000	APBD
	Pemecah Gembak	Mengurangi Abrasi	Desa Dusan	umum	1500 M	✓				Rp. 1.500.000.000	APBD
	Jalan desa	Perbaikan	3 Desa	umum	150 M	✓				Rp. 775.000.000	APBD
	Desing umum Bersih	Kesehatan Masyarakat	Desa Dusan	umum	1 Unit	✓				Rp. 400.000.000	APBD
	Muda Usaha Produktif	pengkatan Ekonomi	Desa Dusan	masyarakat	25 Klt	✓				Rp. 250.000.000	APBD
	Pelatihan Kader PKK	Peningkatan SOM	Desa Dusan	Ibu PKK	70 Orang	✓				Rp. 35.000.000	PNPM- MP
	Pembinaan Kp. Nelayan	Peningkatan SOM	Desa Dusan	nelayan	10 Klt	✓				Rp. 350.000.000	APBD
	MCK	Kesehatan Masyarakat	Desa Dusan	masyarakat	50 Orang	✓				Rp. 500.000.000	PNPM- MP
	Werb. Gading PKK	pemberdayaan Pemukiman	Desa Siring Palit	Ibu PKK	1 Unit	✓				Rp. 200.000.000	APBD
1	Sarana Air Bersih	Kesehatan Masyarakat	Desa Dusan	umum	144 Klt	✓				Rp. 50.000.000	APBD
1	Pemagaran Poyandri/Pusat	Kesehatan Masyarakat	Desa Dusan	umum	2 Unit/1 Unit	✓				Rp. 125.000.000	APBD
2	Drainase	Mencegah Banjir	2 Desa	masyarakat	500 M	✓				Rp. 700.000.000	APBD
Jumlah										Rp. 6.035.000.000	

31 Januari 2012  
 Kepala Desa Siring Palit  
 WARDI WARDI, SH

**PRIORITAS USULAN TAHUN 2014**

1	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				WAKTU PELAKSANA	Biaya	
						B	L	R	P		(Rp)	Sumber
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Halte Bus	tempat menunggu Bus	2 Dusun	pelajar	2 unit	✓					Rp 350.000.000	APBD
	Papadangan	jalur kapal	1 Dusun	melayan	2 unit	✓					Rp 500.000.000	APBD
	Godong serbaguna	tempat pertemuan	semua Dusun	umum	1 unit	✓					Rp 200.000.000	APBD
	Jalan Tali	Perhubungan	semua Dusun	petani	500 M	✓					Rp 400.000.000	APBD
	Perpustakaan Desa	peningkatan Pendidikan	Desa	umum	1 unit	✓					Rp 250.000.000	APBD
	Rumah Layak Huni	kesejahteraan masyarakat	semua Dusun	masyarakat	50 unit	✓					Rp 750.000.000	APBD
	PAUD	peningkatan Pendidikan	semua Dusun	umum	1 unit		✓				Rp 300.000.000	APBD
	Pembinaan Pemuda Desa	Peningkatan SDM	semua Dusun	pemuda	25 orang	✓					Rp 100.000.000	APBD
	SPM	Kesehatan Masyarakat	semua Dusun	masyarakat	1 Km	✓					Rp 500.000.000	APBD
	Pasar Desa	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		masyarakat	1 Unit	✓					Rp 400.000.000	APBD
	Jumlah										Rp 2.970.000.000	

31 Januari 2012  
 Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 SORONG PALPI  
 WARDIN WARDI

**PRIORITAS USULAN TAHUN 2015**

40	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				WAKTU PELAKSANA	Biaya	
						B	L	R	P		(Rp)	Sumber
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Penghijauan	Peningkatan SDA	semua Dusun	Petani	100 Ha	✓					Rp 200.000.000	APBD
2	WARMET	Peningkatan Pendidikan	Desa Sorong Palpi	Pelajar	1 Unit	✓					Rp 50.000.000	APBD
3	Pengembangan Perak Desa	Peningkatan SDM	Desa Sorong Palpi	pemuda	1 Unit	✓					Rp 400.000.000	APBD
4	Senam KUD	Kesejahteraan Masyarakat	Desa Sorong Palpi	masyarakat	1 Unit	✓					Rp 100.000.000	APBD
5	Pembuatan Lupa Sotobay		Desa Sorong Palpi	masyarakat	1 Unit	✓					Rp 80.000.000	APBD
6	Pengadaan Ambulans Motor	Kesejahteraan Masyarakat	Desa Sorong Palpi	masyarakat	1 Unit	✓					Rp 50.000.000	APBD
7	Fabrik ES untuk nelayan	Pengawetan ikan	Desa Sorong Palpi	masyarakat	1 Unit	✓					Rp 10.000.000	APBD
8	Pagar tembok setiap rumah	Ketertarikan Rumah	Desa Sorong Palpi	masyarakat	1,4 Km			✓			Rp 50.000.000	APBD
	Jumlah										Rp 862.000.000	

31 Januari 2012  
 Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 SORONG PALPI  
 WARDIN WARDI

KEPRIAS USULAN TAHUN 2016

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Biaya		
						B	L	R	Per luasan	(Rp)	Sumber	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	BNI Perkubatan	Peningkatan hasil Perkebunan	sema Dusun	petani	1.000 pohon	√				Rp	10.000.000	APBD
	Okidung SMP	peningkatan Pendidikan	Desa Sreang galpi	pelajar	1 unit	√				Rp	400.000.000	APBD
	Pembinaan SDM	Kesejahteraan Masyarakat	sema Dusun	Umum	1 Unit		√			Rp	1.75.000.000	APBD
	Depot Air Minum Idulung	sewa air minum yang layak	sema Dusun	Umum	5 unit	√				Rp	125.000.000	APBD
	Demung Pensi	Pemaluran basat	Desa Sreang galpi	Umum	1 unit	√				Rp	200.000.000	APBD
	Jumlah									Rp	525.000.000	

31 Januari 2012  
 Kepala Desa Sreang Galpi  
 WARDIN WAHID SH

KEPRIAS USULAN TAHUN 2017

No	Jenis Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi	Sasaran	Target	Sifat				Biaya		
						B	L	R	Per luasan	(Rp)	Sumber	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bermarga	pendaran kapal	1 Dusun	Nelayan	1 Unit	√				Rp	500.000.000	APBD
2	Formilasi Jabat	Perkembangan	1 Dusun	Umum	60 Ors	√				Rp	100.000.000	APBD
3	Sanggaraani	Meningkatkan Prestasi	2 Dusun	masyarakat	3 Unit	√				Rp	250.000.000	APBD
4	Pempangan Gedung TK		1 Dusun	masyarakat	1 Unit	√				Rp	100.000.000	APBD
5	Penanaman Pokon Bakau	Kesejahteraan Nelayan	1 Dusun	Nelayan	100 M	√				Rp	10.000.000	APBD
6												
7												
8												
9												
	Jumlah									Rp	1.050.000.000	

31 Januari 2012  
 Kepala Desa Sreang Galpi  
 WARDIN WAHID SH